



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:.../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
10. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
11. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

13. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
14. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
15. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
16. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
18. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) SBU digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, SBU dapat berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah, RKPD Perangkat Daerah, DPA Perangkat Daerah dan DPPA Perangkat Daerah;

b. estimasi.../5

- b. estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah, RKPA Perangkat Daerah, DPA Perangkat Daerah, dan DPPA Perangkat Daerah; dan
- c. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)/ *owner estimate* (OE).

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup SBU yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. standar biaya umum honorarium;
 - b. standar biaya umum barang dan jasa; dan
 - c. standar biaya umum perjalanan dinas.
- (2) Standar biaya umum honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya dan diberikan kepada PNS dan Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- (3) Standar biaya umum barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya sebagai imbalan jasa atau pemeliharaan barang yang mana barang tersebut memiliki asas manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Standar biaya umum perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya yang telah distandarisasikan dan diberikan kepada ASN maupun non-ASN untuk melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar Daerah.
- (5) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun SBU tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani di atas meterai oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penggunaan satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan *price list* harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang dan jasa serta dapat dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel.
- (4) Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kesatu
Standar Biaya Umum Honorarium

Pasal 5

SBU Honorarium terdiri dari:

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. honorarium penanggung jawab pengelola barang milik Daerah;
- c. honorarium pengadaan barang dan jasa;
- d. honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ);
- e. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia;
- f. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- g. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- h. honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- i. honorarium rohaniwan;
- j. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola *website*;
- k. honorarium penyelenggara ujian;
- l. honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi;
- m. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. honorarium tim anggaran pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada:
 - a. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah yaitu Gubernur;
 - b. koordinator pengelolaan keuangan Daerah yaitu Sekretaris Daerah;

c. pejabat.../7

- c. pejabat pengelola keuangan Daerah yaitu Kepala BPPKAD;
 - d. bendahara umum Daerah yaitu Kepala BPPKAD selaku SKPKD;
 - e. kuasa BUD yaitu pejabat yang diberikan kewenangan untuk menggantikan Kepala BPPKAD pada saat berhalangan dan/atau sedang menjalankan tugas di luar Daerah;
 - f. pengguna anggaran (PA);
 - g. kuasa pengguna anggaran (KPA)/kepala unit Perangkat Daerah;
 - h. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
 - i. pejabat pembantu pelaksana teknis kegiatan (PPPTK);
 - j. pejabat penatausahaan keuangan perangkat daerah (PPK-PD);
 - k. bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan; dan
 - l. bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
 - (3) Untuk membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Perangkat Daerah, PA/KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dengan besaran honor mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
 - (4) Jumlah pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah (PPK Perangkat Daerah) adalah satu orang yang membawahi beberapa KPA.
 - (5) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran maksimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Paragraf 2

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 7

Honorarium penanggung jawab pengelola barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada:

- a. pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik Daerah;
- b. pengelola barang milik Daerah;
- c. pejabat penatausahaan pengelola barang;
- d. pengurus barang pengelola;

e. pembantu.../8

- e. pembantu pengurus barang pengelola;
- f. pengurus barang pengguna;
- g. pembantu pengurus barang pengguna; dan
- h. pengurus barang pembantu.

Paragraf 3

Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 8

- (1) Honorarium pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa;
 - b. honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. honorarium pengguna anggaran.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan honorarium yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat pengadaan barang dan jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang dan jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4

Honorarium Perangkat Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan honorarium perangkat kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- (2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 5

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 10

- (1) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; dan
 2. dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- (3) Honorarium moderator diberikan kepada pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (4) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; dan

b. moderator.../10

- b. moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (5) Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, loka karya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (8) Honorarium panitia dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (9) Honorarium panitia dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Paragraf 6

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah.
- (2) pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud.

- (3) Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No. | Jabatan | Klasifikasi | | |
|-----|--|-------------|----|-----|
| | | I | II | III |
| 1 | Pejabat Eselon I dan Eselon II | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Pejabat Eselon III | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional | 5 | 6 | 7 |

- (4) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) tim yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah yaitu:
- tim pelaksana kegiatan; dan
 - sekretariat tim pelaksana kegiatan.

Pasal 12

- Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah.
- Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Gubernur atau antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Pasal 13

- Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) huruf b diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- Sekretaris tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- Sekretariat tim pelaksana kegiatan dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

- (4) Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.

Paragraf 7

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

Pasal 14

- (1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- (3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 8

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 15

- (1) Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi dengan ketentuan:

- a. lulusan sekolah lanjutan tingkat atas diberikan sesuai upah minimum Provinsi;
- b. lulusan diploma I/diploma II/diploma III/sarjana terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi;
- c. lulusan sarjana (strata 1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi;
- d. lulusan master (strata 2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi; dan
- e. lulusan doktor (strata 3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi.

Paragraf 9

Honorarium Rohaniwan

Pasal 16

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Rohaniwan.

Paragraf 10

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

Pasal 17

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Bila dalam tim penyusun jurnal diperlukan unsur sekretariat yang adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*per-review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- (3) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Gubernur, untuk *Website* atau media sejenis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 11
Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 18

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 12
Honorarium Penulis Butir Soal

- Pasal 19
- (1) Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal.
 - (2) Honorarium penulis butir soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 13
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

- Pasal 20
- (1) Honorarium penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - (2) Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara;

b. berasal dari.../15

- b. berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (3) Honorarium pengajar yang berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara diberikan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Perangkat Daerah penyelenggara.
 - (4) Honorarium pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
 - (5) Honor pengajar bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka dengan ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur.
 - (7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 - (8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
 - (9) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 14

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 21

Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pasal 22

- (1) ASN yang dapat diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan pembentukan tim dan/atau sebutan lainnya mengikuti susunan yang ada dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Dalam hal belum ditetapkannya berapa besaran standar biaya honorarium maka usulan standar biaya honorarium dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Standar Biaya Umum Barang dan Jasa

Pasal 24

- (1) Standar biaya umum barang dan jasa terdiri dari:
 - a. belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - b. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - c. belanja konsumsi rapat;
 - d. belanja makan minum aktivitas lapangan
 - e. belanja pemeliharaan;
 - f. belanja sewa;
 - g. belanja publikasi dan penyiaran;
 - h. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

i. belanja pengiriman.../17

- i. belanja pengiriman barang;
 - j. belanja pajak kendaraan dinas;
 - k. belanja jasa petugas upacara hari-hari besar nasional;
 - l. belanja jasa laboratorium;
 - m. jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - n. jasa pengelola kebersihan taman;
 - o. jasa pembuatan aplikasi.
 - p. belanja transpor peserta kegiatan; dan
 - q. belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan Daerah.
- (2) Belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif.
- (3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri pejabat Eselon II/masyarakat.
- (4) Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dari uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Belanja konsumsi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan makan dan minum untuk kegiatan rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara dan rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- (6) Belanja makan minum aktivitas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pengadaan makan dan minuman untuk kegiatan aktivitas lapangan, acara adat.
- (7) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas dan sarana kantor dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.

- (8) Belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 6 (enam), kendaraan khusus, mobilitas air, mesin, sewa peralatan seperti meja, kursi, *sound system* dan tenda sewa gedung pertemuan dan stan pameran.
- (9) Belanja publikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya publikasi dan penyiaran berupa surat kabar, majalah, media cetak, penyiaran televisi dan penyiaran iklan.
- (10) Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa kawat/faksimile/internet, belanja air bersih dan belanja listrik.
- (11) Belanja pengiriman barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pengiriman barang.
- (12) Belanja pajak kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pajak kendaraan dinas.
- (13) Belanja jasa petugas upacara hari-hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa petugas upacara hari-hari besar nasional, seperti anggota pengamanan, dirigen, guru pendamping aubade, komandan upacara, Paswal TNI, Patwal, pemain *keyboard*, pembawa bunga tabur, pendamping penerima tamu, peniup trompet, perwira upacara, petugas jaga tugu, petugas medis, petugas obor, petugas pengibar bendera, petugas PMI, tim *drumband*, tim korsik, tim tari dan veteran.
- (14) Belanja jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa laboratorium.
- (15) Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.
- (16) Jasa pengelola kebersihan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa pengelola kebersihan taman.
- (17) Jasa pembuatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf o yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa tenaga pembuat aplikasi.

(18) Belanja transport.../19

- (18) Belanja transpor peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa transpor.
- (19) Belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q yaitu standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan Daerah.

Bagian Ketiga
Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya lainnya;
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata 1/ Strata 2/ Strata 3 pelatihan teknis; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan latihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua DPRPT/MRP-PPT, Wakil Ketua DPRPT/MRP-PPT, dan anggota DPRPT/MRP-PPT.
- (4) Pejabat Daerah dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aparatur sipil negara (ASN)/pegawai negeri sipil daerah (PNSD);
 - b. calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD); dan
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mereka yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Paragraf 1
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 26

Prinsip pelaksanaan perjalanan dinas, sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisien dalam penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Paragraf 2
Klasifikasi Perjalanan Dinas

Pasal 27

Perjalanan dinas terdiri atas:

- a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
- b. perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 29

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRPT/MRP-PPT, Anggota DPRPT/MRP-PPT dan Pejabat/Pegawai lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kementerian yang melaksanakan urusan dalam negeri dan kementerian yang melaksanakan urusan keuangan.

Paragraf 3
Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 30

Tata cara perjalanan dinas meliputi:

- a. persetujuan perjalanan dinas;
- b. penandatangan surat tugas; dan
- c. pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain setelah mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRPT/MRP-PPT untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRPT/MRP-PPT, Wakil Ketua DPRPT/MRP-PPT, dan Anggota DPRPT/MRP-PPT;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perangkat Daerah; dan
 - d. Kepala Perangkat Daerah untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional ASN non Eselon/CPNS/PPPK/Tenaga Kontrak (Honor).
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus membatasi perjalanan dinas untuk:
 - a. hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting; dan
 - b. melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berwenang memberikan persetujuan.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten Administrasi Umum berwenang memberikan persetujuan.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten yang berada di tempat berwenang memberikan persetujuan.
- (7) Pejabat yang berhak membuat usulan perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang yaitu:
 - a. Kepala Perangkat Daerah /Plt. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. Kepala Biro untuk Sekretariat Daerah.

(8) Dalam hal.../22

- (8) Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah /Kepala Biro pada Sekretariat Daerah sedang melaksanakan perjalanan dinas atau berhalangan jika pelaksanaan perjalanan dinas sifatnya sangat mendesak atau darurat maka usulan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibuat oleh Plh. Pimpinan Perangkat Daerah /Plh. Kepala Bagian atau pejabat satu tingkat di bawahnya setelah dikoordinasikan dengan pimpinan Perangkat Daerah/Kepala Biro.
- (9) Pejabat negara, pejabat Daerah/ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (10) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut:
 - a. Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Gubernur apabila Gubernur berhalangan untuk perjalanan dinas Jabatan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua DPRPT/MRP-PPT untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRPT/MRP-PPT, Wakil Ketua DPRPT/MRP-PPT, dan Anggota DPRPT/MRP-PPT;
 - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh para Kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli, pejabat eselon III dan eselon IV, staf dan pihak lain di lingkungan Sekretaris Daerah, suami/istri Gubernur, dan suami/istri Wakil Gubernur; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPPD dalam lingkup Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh pejabat berwenang yang sama.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan perjalanan dinas kepada pihak lain tanpa disertai pejabat, kepada pihak lain dibuatkan surat tugas tersendiri yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Jumlah Hari Perjalanan Dinas

Pasal 33

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas merupakan jumlah maksimal hari yang dilaksanakan oleh penerima SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. lama hari kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan

b. lama hari.../23

- b. lama hari perjalanan dari lokasi keberangkatan ke tempat tujuan pulang pergi (PP) yang dihitung sebelum hari dan sesudah hari pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 5
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen- sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu uang yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas secara lumsu.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - b. transpor dalam kota untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana surat perintah tidak menggunakan biaya hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana surat perintah diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumsu.
- (6) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRPT/MRP-PPT, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II berupa biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumsu.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada perincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

- (1) Perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana surat perintah dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana yang tertuang dalam surat perintah.
- (2) Kewenangan penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawah pejabat pemberi surat perintah.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud pelaksanaan tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Pelaksana surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanjutkan perintah atasan pelaksana untuk kegiatan yang berbeda, atasan pelaksana penerbitan surat perintah tugas lanjutan.
- (5) Perjalanan dinas jabatan dalam Daerah yang dilaksanakan di bawah 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan surat perintah.
- (6) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam, atasan pelaksana menerbitkan surat perintah.

Pasal 36

Besarnya uang representasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (6), diberikan sekali pada setiap kegiatan sesuai dengan surat perintah, yang besarnya terlampir pada peraturan ini.

Pasal 37

Perjalanan dinas dapat diberikan kepada suami/istri Gubernur dan suami/istri Wakil Gubernur, suami/istri Ketua dan Wakil Ketua DPRPT/MRP-PPT, dan suami/istri pejabat eselon I dan eselon II apabila dalam surat panggilan/undangan mengharuskan didampingi suami/istri.

Pasal 38

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibayarkan lagi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Perangkat Daerah pelaksana surat perintah bila tersedia anggarannya.

(3) Panitia penyelenggara.../25

- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat/seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana surat perintah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana surat perintah menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Khusus untuk ajudan yang mendampingi Gubernur atau Wakil Gubernur dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (7) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan pihak ketiga/unsur masyarakat, personil non pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut:
 - a. bagi tenaga ahli atau wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan III; dan
 - b. bagi tenaga teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan II.

Pasal 39

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana surat perintah hanya diberikan uang harian.

Pasal 40

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan dan/atau lanjutan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (3) Komponen perjalanan dinas dalam Daerah dan luar Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana surat perintah dapat diberikan tambahan uang harian, dan biaya penginapan.
- (2) Tambahan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, dan biaya penginapan pada DPA Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Dalam penerbitan surat perintah, PA/PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Perjalanan dinas dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5), pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam surat perintah.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perintah, pelaksana surat perintah harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterima kepada PA/PPK melalui bendahara.

Pasal 43

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah pelaksana surat perintah.

Paragraf 6

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 44

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Perangkat Daerah berkenaan.

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana surat perintah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui:
 - a. penyedia jasa perjalanan; atau
 - b. pelaksana surat perintah.
- (3) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui penyedia jasa perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 46

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana surat perintah oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas;
 - b. fotokopi surat perintah;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. perincian perkiraan biaya perjalanan dinas.

Pasal 47

- (1) Penyedia jasa pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penempatan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 48

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang disediakan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 49

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan pada prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 50

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan kepada pelaksana surat perintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana surat perintah kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (3) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan menyerahkan bukti-bukti yang sah.

Pasal 51

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan surat perintah membayar oleh pejabat penanda tangan SPM, dan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana Surat Perintah, atau paling rendah pejabat Eselon II bagi pelaksana Surat Perintah di bawah pejabat Eselon III; dan

b. pernyataan/tanda.../29

- b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya pembatalan tiket atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Paragraf 7
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 53

- (1) Pelaksana surat perintah bertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana surat perintah;
 - b. surat perintah yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti model transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, apabila tiket dan bukti penginapan/bukti-bukti perjalanan dinas hilang maka bukti surat pertanggung jawaban dibayarkan dengan daftar pengeluaran riil dan dilampiri dengan surat pernyataan dari pelaksana surat perintah; dan
 - g. laporan perjalanan dinas bimbingan teknis, kunjungan kerja, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 54

- (1) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.

- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran yang disampaikan bendahara pengeluaran untuk di verifikasi.
- (3) Bendahara pengeluaran dan PPTK mengesahkan bukti pengeluaran dan menyampaikan kepada PPK sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan surat permintaan membayar/surat permintaan pencairan dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.

Pasal 55

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diterima daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 56

Pelaksana surat perintah yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan perjalanan dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada surat perintah, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang telah ditentukan dalam SPT, wajib menyetor kembali biaya perjalanan yang telah diperolehnya kepada bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Gubernur, Ketua DPRDT/MRP-PPT, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan teguran tertulis kepada pelaksana Surat perintah apabila tidak melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Bendahara wajib mengingatkan pelaksana surat perintah secara tertulis agar segera mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah diperoleh dengan melampirkan bukti yang sah setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 58

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, apabila tidak dipenuhi oleh pelaksana surat perintah yang bersangkutan, Gubernur, Ketua DPRDT/MRP-PPT, Sekretaris Daerah, atau kepala Perangkat Daerah wajib untuk:

a. tidak mengajukan.../31

- a. tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan surat perintah berikutnya kepada yang bersangkutan; dan
 - b. memerintahkan bendahara untuk mengadakan pemotongan tunjangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan pelaksana surat perintah yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya yang telah diterimanya.
- (2) Pemotongan gaji oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada penetapan dari majelis tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/surat perintah yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana surat perintah dapat diberikan tambahan uang harian, biaya dan penginapan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/kepala bandara/perusahaan transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (2) Pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Perjalanan dinas dapat dilakukan sekaligus untuk 2 (dua) atau lebih kegiatan dengan kegiatan dan tempat yang berbeda, dengan dasar surat perintah yang dikeluarkan dalam rangka efisiensi anggaran.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat dilakukan namun pembayarannya dilakukan hanya satu kali.
- (5) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (6) Khusus perjalanan dinas dalam rangka penagihan pajak dan retribusi daerah serta pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat waktunya dapat melebihi 7 (tujuh) hari.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP-197606082002121002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM

HONORARIUM

| NO | URAIAN | | SATUAN | HARGA |
|----|--|--|-------------|--------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A | STANDAR BIAYA UMUM HONORARIUM | | | |
| 1 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN | | | |
| | 1,1 | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | | |
| | | a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta | Orang/Bulan | 1.040.000,00 |
| | | b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta | Orang/Bulan | 1.250.000,00 |
| | | c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta | Orang/Bulan | 1.450.000,00 |
| | | d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Bulan | 1.660.000,00 |
| | | e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar | Orang/Bulan | 1.970.000,00 |
| | | f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar | Orang/Bulan | 2.280.000,00 |
| | | g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar | Orang/Bulan | 2.590.000,00 |
| | | h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar | Orang/Bulan | 3.010.000,00 |
| | | i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar | Orang/Bulan | 3.420.000,00 |
| | | j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar | Orang/Bulan | 3.840.000,00 |
| | | k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar | Orang/Bulan | 4.250.000,00 |
| | | l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Bulan | 4.770.000,00 |
| | | m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Bulan | 5.290.000,00 |
| | | n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar | Orang/Bulan | 5.810.000,00 |
| | | o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 6.330.000,00 |
| | | p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 7.370.000,00 |
| | 1,2 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen | | |
| | | a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta | Orang/Bulan | 1.010.000 |

| | | | | | |
|--|-----|--|---|-------------|-----------|
| | | b. | Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta | Orang/Bulan | 1.210.000 |
| | | c. | Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta | Orang/Bulan | 1.410.000 |
| | | d. | Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Bulan | 1.610.000 |
| | | e. | Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar | Orang/Bulan | 1.910.000 |
| | | f. | Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar | Orang/Bulan | 2.210.000 |
| | | g. | Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar | Orang/Bulan | 2.520.000 |
| | | h. | Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar | Orang/Bulan | 2.920.000 |
| | | i. | Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar | Orang/Bulan | 3.320.000 |
| | | j. | Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar | Orang/Bulan | 3.720.000 |
| | | k. | Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar | Orang/Bulan | 4.130.000 |
| | | l. | Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Bulan | 4.630.000 |
| | | m. | Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Bulan | 5.130.000 |
| | | n. | Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar | Orang/Bulan | 5.640.000 |
| | | o. | Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 6.140.000 |
| | | p. | Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 7.140.000 |
| | 1,3 | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/ Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar | | | |
| | | a. | Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta | Orang/Bulan | 400,000 |
| | | b. | Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta | Orang/Bulan | 480,000 |
| | | c. | Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta | Orang/Bulan | 570,000 |
| | | d. | Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Bulan | 660,000 |
| | | e. | Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar | Orang/Bulan | 770,000 |
| | | f. | Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar | Orang/Bulan | 880,000 |
| | | g. | Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar | Orang/Bulan | 990,000 |
| | | h. | Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar | Orang/Bulan | 1.250.000 |
| | | i. | Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar | Orang/Bulan | 1.520.000 |
| | | j. | Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar | Orang/Bulan | 1.780.000 |
| | | k. | Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar | Orang/Bulan | 2.040.000 |
| | | l. | Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Bulan | 2.440.000 |
| | | m. | Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Bulan | 2.830.000 |
| | | n. | Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar | Orang/Bulan | 3.230.000 |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-------------|-----------|
| | | o. | Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 3.620.000 |
| | | p. | Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 4.420.000 |
| | 1,4 | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan | | | |
| | | a. | Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta | Orang/Bulan | 340,000 |
| | | b. | Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta | Orang/Bulan | 420,000 |
| | | c. | Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta | Orang/Bulan | 500,000 |
| | | d. | Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Bulan | 570,000 |
| | | e. | Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar | Orang/Bulan | 670,000 |
| | | f. | Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar | Orang/Bulan | 770,000 |
| | | g. | Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar | Orang/Bulan | 860,000 |
| | | h. | Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar | Orang/Bulan | 1.090.000 |
| | | i. | Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar | Orang/Bulan | 1.320.000 |
| | | j. | Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar | Orang/Bulan | 1.550.000 |
| | | k. | Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar | Orang/Bulan | 1.780.000 |
| | | l. | Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Bulan | 2.120.000 |
| | | m. | Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Bulan | 2.470.000 |
| | | n. | Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar | Orang/Bulan | 2.810.000 |
| | | o. | Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 3.160.000 |
| | | p. | Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 3.840.000 |
| | 1,5 | Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai | | | |
| | | a. | Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta | Orang/Bulan | 260,000 |
| | | b. | Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta sampai dengan Rp.250 juta | Orang/Bulan | 310,000 |
| | | c. | Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta sampai dengan Rp.500 juta | Orang/Bulan | 370,000 |
| | | d. | Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Bulan | 430,000 |
| | | e. | Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar | Orang/Bulan | 500,000 |
| | | f. | Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp.5 miliar | Orang/Bulan | 570,000 |
| | | g. | Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar | Orang/Bulan | 640,000 |
| | | h. | Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar | Orang/Bulan | 810,000 |
| | | i. | Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar | Orang/Bulan | 980,000 |
| | | j. | Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar | Orang/Bulan | 1.150.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------|-------------|---------|
| | | k. | Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar | Orang/Bulan | 1.330.000 | |
| | | l. | Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Bulan | 1.580.000 | |
| | | m. | Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Bulan | 1.840.000 | |
| | | n. | Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar | Orang/Bulan | 2.090.000 | |
| | | o. | Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 2.350.000 | |
| | | p. | Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun | Orang/Bulan | 2.860.000 | |
| | | | | | | |
| 2 | HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH | | | | | |
| | 2.1 | HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH | | | | |
| | | a. | Pengurus Barang Pengelola | Orang/Bulan | 500,000.00 | |
| | | b. | Pembantu Pengurus Barang Pengelola | Orang/Bulan | 450,000.00 | |
| | | c. | Pengurus Barang Pengguna | Orang/Bulan | 400,000.00 | |
| | | d. | Pembantu Pengurus Barang Pengguna | Orang/Bulan | 350,000.00 | |
| | | e. | Pengurus barang Pembantu | Orang/Bulan | 300,000.00 | |
| 3 | HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | |
| | 3.1 | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa | | | Orang/Bulan | 680,000 |
| | 3.2 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan jasa | | | | |
| | 3/2/2001 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi | | | | |
| | | a. | Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta | Orang/Paket | 680,000 | |
| | | b. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.200 juta sampai dengan Rp.500 juta | Orang/Paket | 850,000 | |
| | | c. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Paket | 1.020.000 | |
| | | d. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar | Orang/Paket | 1.270.000 | |
| | | e. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar | Orang/Paket | 1.520.000 | |
| | | f. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar sampai dengan Rp.10 miliar | Orang/Paket | 1.780.000 | |
| | | g. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar | Orang/Paket | 2.120.000 | |
| | | h. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar | Orang/Paket | 2.450.000 | |
| | | i. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar | Orang/Paket | 2.790.000 | |
| | | j. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar | Orang/Paket | 3.130.000 | |
| | | k. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Paket | 3.580.000 | |
| | | l. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Paket | 4.030.000 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|--|-------------|-----------|--|
| | | m. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar. | Orang/Paket | 4.490.000 | |
| | | n. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Paket | 4.940.000 | |
| | | o | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun | Orang/Paket | 5.560.000 | |
| | 3/2/ 2002 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang | | | | |
| | | a. | Nilai Pagu Pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta | Orang/Paket | 760,000 | |
| | | b. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta | Orang/Paket | 760,000 | |
| | | c. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Paket | 920,000 | |
| | | d. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar | Orang/Paket | 1.140.000 | |
| | | e. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar | Orang/Paket | 1.370.000 | |
| | | f. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar | Orang/Paket | 1.600.000 | |
| | | g. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp. 25 miliar | Orang/Paket | 1.910.000 | |
| | | h. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar | Orang/Paket | 2.210.000 | |
| | | i. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 miliar sampai dengan Rp. 75 miliar | Orang/Paket | 2.520.000 | |
| | | j. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar sampai dengan Rp. 100 miliar | Orang/Paket | 2.820.000 | |
| | | k. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 250 miliar | Orang/Paket | 3.230.000 | |
| | | l. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar sampai dengan Rp. 500 miliar | Orang/Paket | 3.640.000 | |
| | | m. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar sampai dengan Rp. 750 miliar | Orang/Paket | 4.040.000 | |
| | | n. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar sampai dengan Rp. 1 triliun | Orang/Paket | 4.450.000 | |
| | | o | Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun | Orang/Paket | 5.010.000 | |
| | 3/2/ 2003 | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi | | | | |
| | | a. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp.50 juta | Orang/Paket | 450,000 | |
| | | b. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi Rp.50 juta sampai dengan Rp. 100 juta | Orang/Paket | 450,000 | |
| | | c. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya Rp.100 juta | Orang/Paket | 450,000 | |
| | | d. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 100 juta sampai dengan Rp.250 juta | Orang/Paket | 480,000 | |
| | | e. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 250 juta sampai dengan Rp.500 juta | Orang/Paket | 600,000 | |

| | | | | | |
|--|----------|----|--|-------------|-----------|
| | | f. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Paket | 720,000 |
| | | g. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 2,5 miliar | Orang/Paket | 910,000 |
| | | h. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 2,5 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar | Orang/Paket | 1.090.000 |
| | | i. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 5 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar | Orang/Paket | 1.270.000 |
| | | j. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp. 25 miliar | Orang/Paket | 1.510.000 |
| | | k. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 25 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar | Orang/Paket | 1.750.000 |
| | | l. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 50 miliar sampai dengan Rp. 75 miliar | Orang/Paket | 1.990.000 |
| | | m. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 75 miliar sampai dengan Rp. 100 miliar | Orang/Paket | 2.230.000 |
| | | n. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 250 miliar | Orang/Paket | 2.560.000 |
| | | o. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 250 miliar sampai dengan Rp. 500 miliar | Orang/Paket | 2.880.000 |
| | | p. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 500 miliar sampai dengan Rp. 750 miliar | Orang/Paket | 3.200.000 |
| | | q. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 750 miliar sampai dengan Rp. 1 triliun | Orang/Paket | 3.520.000 |
| | | r. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp. 1 triliun | Orang/Paket | 3.960.000 |
| | | | | | |
| | 3/2/2003 | | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya | | |
| | | a. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta | Orang/Paket | 600,000 |

| | | | | | | |
|--|----------|---|--|-------------|-----------|--|
| | | b. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp.1 miliar | Orang/Paket | 720,000 | |
| | | c. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp.2,5 miliar | Orang/Paket | 910,000 | |
| | | d. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 2,5 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar | Orang/Paket | 1.090.000 | |
| | | e. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar | Orang/Paket | 1.270.000 | |
| | | f. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp. 25 miliar | Orang/Paket | 1.510.000 | |
| | | g. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar | Orang/Paket | 1.750.000 | |
| | | h. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar sampai dengan Rp. 75 miliar | Orang/Paket | 1.990.000 | |
| | | i. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar sampai dengan Rp. 100 miliar | Orang/Paket | 2.230.000 | |
| | | j. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 250 miliar | Orang/Paket | 2.560.000 | |
| | | k. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar sampai dengan Rp. 500 miliar | Orang/Paket | 2.880.000 | |
| | | l. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar sampai dengan Rp. 750 miliar. | Orang/Paket | 3.200.000 | |
| | | m. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar sampai dengan Rp. 1 triliun | Orang/Paket | 3.520.000 | |
| | | n. | Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun | Orang/Paket | 3.960.000 | |
| | | | | | | |
| | 3.3 | Honorarium Pengguna Anggaran | | | | |
| | 3/3/2001 | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) | | | | |
| | | a. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Paket | 3.580.000 | |
| | | b. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Paket | 4.030.000 | |

| | | | | | | |
|--|----------|--|---|-------------|-----------|--|
| | | c. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar | Orang/Paket | 4.490.000 | |
| | | d. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Paket | 4.940.000 | |
| | | e. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun | Orang/Paket | 5.560.000 | |
| | 3/3/2002 | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | | | | |
| | | a. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Paket | 3.230.000 | |
| | | b. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Paket | 3.640.000 | |
| | | c. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar | Orang/Paket | 4.040.000 | |
| | | d. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Paket | 4.450.000 | |
| | | e. | Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun | Orang/Paket | 5.010.000 | |
| | 3/3/2003 | Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) | | | | |
| | | a. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.25 miliar | Orang/Paket | 1.510.000 | |
| | | b. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.25 miliar sampai dengan Rp.50 miliar | Orang/Paket | 1.750.000 | |
| | | c. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.50 miliar sampai dengan Rp.75 miliar | Orang/Paket | 1.990.000 | |
| | | d. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.75 miliar sampai dengan Rp.100 miliar | Orang/Paket | 2.230.000 | |
| | | e. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 miliar sampai dengan Rp.250 miliar | Orang/Paket | 2.560.000 | |
| | | f. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 miliar sampai dengan Rp.500 miliar | Orang/Paket | 2.880.000 | |
| | | g. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 miliar sampai dengan Rp.750 miliar | Orang/Paket | 3.200.000 | |
| | | h. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 miliar sampai dengan Rp.1 triliun | Orang/Paket | 3.520.000 | |
| | | i. | Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 triliun | Orang/Paket | 3.960.000 | |
| | 3/3/2004 | TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|----------------|------------|
| | | a. | Pelindung | Orang/Bulan | 10,000,000 |
| | | b. | Pembina | Orang/Bulan | 5,000,000 |
| | | c. | Pengarah | Orang/Bulan | 5,000,000 |
| | | d. | Pengawas | Orang/Bulan | 5,000,000 |
| | 3/3/ 2005 | TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | |
| | | a. | Penanggung jawab PBJ | Orang/Bulan | 22,000,000 |
| | | b. | Koordinator Unit kerja PBJ | Orang/Bulan | 12,000,000 |
| | | c. | Koordinator Unit kerja LPSE | Orang/Bulan | 12,000,000 |
| | | d. | Koordinator Pembinaan dan Advokasi | Orang/Bulan | 12,000,000 |
| | | e. | Anggota Unit Kerja PBJ | Orang/Bulan | 5,000,000 |
| | | f. | Anggota Unit Kerja LPSE | Orang/Bulan | 5,000,000 |
| | | g. | Kelompok Kerja Pemilihan | Orang/Bulan | 20,000,000 |
| | | h. | Pendamping Hukum | Orang/Bulan | 5,000,000 |
| | | i. | Staf Teknis | Orang/Bulan | 4,166,000 |
| | | j. | Staf Pendukung | Orang/Bulan | 3,000,000 |
| 4 | HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) | | | | |
| | 4.1 | Kepala | | Orang/Bulan | 1.000.000 |
| | 4.2 | Sekretaris/Staf Pendukung | | Orang/Bulan | 750,000 |
| 5 | HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA | | | | |
| | 5.1 | Honorarium Narasumber / Pembahas | | | |
| | | a. | Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya | Orang/Jam | 1.700.000 |
| | | b. | Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan | Orang/Jam | 1.400.000 |
| | | c. | Pejabat Eselon I/yang disetarakan | Orang/Jam | 1.200.000 |
| | | d. | Pejabat Eselon II/yang disetarakan | Orang/Jam | 1.000.000 |
| | | e. | Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan | Orang/Jam | 900,000 |
| | 5.2 | Honorarium Moderator | | Orang/Kegiatan | 700,000 |
| | 5.3 | Honorarium Pembawa Acara | | Orang/Kegiatan | 400,000 |
| | 5.4 | Honorarium Panitia | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------|-----------|
| | | a. | Penanggung Jawab | Orang/Kegiatan | 450,000 |
| | | b. | Ketua/Wakil Ketua | Orang/Kegiatan | 400,000 |
| | | c. | Sekretaris | Orang/Kegiatan | 300,000 |
| | | d. | Anggota | Orang/Kegiatan | 300,000 |
| 6 | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN | | | | |
| | 6.1 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan | | | |
| | 6/1/2001 | Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | | | |
| | | a. | Pengarah | Orang/Bulan | 1.500.000 |
| | | b. | Penanggung Jawab | Orang/Bulan | 1.250.000 |
| | | c. | Koordinator / Ketua | Orang/Bulan | 1.000.000 |
| | | d. | Wakil Ketua | Orang/Bulan | 850,000 |
| | | e. | Sekretaris | Orang/Bulan | 750,000 |
| | | f. | Anggota | Orang/Bulan | 750,000 |
| | 6/1/2002 | Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | | |
| | | a. | Pengarah | Orang/Bulan | 750,000 |
| | | b. | Penanggung Jawab | Orang/Bulan | 700,000 |
| | | c. | Koordinator / Ketua | Orang/Bulan | 650,000 |
| | | d. | Wakil Ketua | Orang/Bulan | 600,000 |
| | | e. | Sekretaris | Orang/Bulan | 500,000 |
| | | f. | Anggota | Orang/Bulan | 500,000 |
| | 6/1/2003 | Yang ditetapkan Oleh Kepala Perangkat Daerah | | | |
| | | a. | Pengarah | Orang/Bulan | 500,000 |
| | | b. | Penanggung Jawab | Orang/Bulan | 450,000 |
| | | c. | Ketua | Orang/Bulan | 400,000 |
| | | d. | Wakil Ketua | Orang/Bulan | 350,000 |

| | | | | |
|----|--|--|----------------|-----------|
| | e. | Sekretaris | Orang/Bulan | 300,000 |
| | f. | Anggota | Orang/Bulan | 300,000 |
| | 6.2 | Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | |
| | 6/2/2001 | Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah | | |
| | a. | Ketua / Wakil Ketua | Orang/Bulan | 250,000 |
| | b. | Anggota | Orang/Bulan | 220,000 |
| 7 | HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA | | | |
| | 7.1 | Honorarium pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli | Orang/Kegiatan | 1.800.000 |
| | 7.2 | Honorarium beracara | Orang/Kegiatan | 1.800.000 |
| 8 | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, HONORARIUM TENAGA HONORER/TENAGA KONTRAK DAERAH DAN HONORARIUM KHUSUS TENAGA MEDIS | | | |
| | 8.1 | HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL | | |
| | | SLTA | Orang/Bulan | 2.100.000 |
| | | D1/DII/DIII/Sarjana Terapan | Orang/Bulan | 2.400.000 |
| | | Sarjana (S1) | Orang/Bulan | 2.600.000 |
| | | Master (S2) | Orang/Bulan | 2.800.000 |
| | | Doktor (S3) | Orang/Bulan | 3.000.000 |
| | 8.3 | HONORARIUM TENAGA HARIAN/KONTRAK/KEAMANAN | | |
| | | Satpam dan Pengemudi | Orang/Bulan | 4.604.000 |
| | | Petugas Kebersihan dan Pramubakti | Orang/Bulan | 4.185.000 |
| 9 | HONORARIUM ROHANIAWAN | | | |
| | 9.1 | HONORARIUM ROHANIAWAN | Orang/Kegiatan | 400,000 |
| 10 | HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE | | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|------------------|---------|
| | 10.1 | Honorarium Tim Penyusun Jurnal | | | |
| | | a. | Penanggung Jawab | Orang/Terbitan | 500,000 |
| | | b. | Redaktur | Orang/Terbitan | 400,000 |
| | | c. | Penyunting / Editor | Orang/Terbitan | 300,000 |
| | | d. | Desain Grafis | Orang/Terbitan | 180,000 |
| | | e. | Fotografer | Orang/Terbitan | 180,000 |
| | | f. | Sekretariat | Orang/Terbitan | 150,000 |
| | 10.2 | Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah | | | |
| | | a. | Penanggung Jawab | Orang/Terbitan | 400,000 |
| | | b. | Redaktur | Orang/Terbitan | 300,000 |
| | | c. | Penyunting / Editor | Orang/Terbitan | 250,000 |
| | | d. | Desain Grafis | Orang/Terbitan | 180,000 |
| | | e. | Fotografer | Orang/Terbitan | 180,000 |
| | | f. | Sekretariat | Orang/Terbitan | 150,000 |
| | 10.3 | Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi /Pengelola Website | | | |
| | | a. | Penanggung Jawab | Orang/Bulan | 500,000 |
| | | b. | Redaktur | Orang/Bulan | 450,000 |
| | | c. | Editor | Orang/Bulan | 400,000 |
| | | d. | Web Admin | Orang/Bulan | 350,000 |
| | | e. | Web Developer | Orang/Bulan | 300,000 |
| | 10,4 | Honorarium Penulis/Pembuat Artikel | | | |
| | | a. | Penulis/Pembuat Artikel Jurnal | Per Halaman | 200,000 |
| | | b. | Penulis/Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Website | Per Halaman | 100,000 |
| | | | | | |
| 11 | HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN | | | | |
| | 11.1 | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar | | | |
| | | a. | Penyusun/pembuat bahan ujian | Naskah/Pelajaran | 150,000 |
| | | b. | Pengawas Ujian | Orang/Hari | 240,000 |
| | | c. | Pemeriksaan hasil ujian | Siswa/Mata Ujian | 5,000 |
| | 11.2 | Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah | | | |
| | | a. | Penyusun/pembuat bahan ujian | Naskah/Pelajaran | 190,000 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| | | b. | Pengawas Ujian | Orang /Hari | 270,000 | |
| | | c. | Pemeriksaan hasil ujian | Siswa/Mata Ujian | 7,500 | |
| 12 | HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA | | | | | |
| | 12.1 | Honorarium Penulisan Butir soal Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota | | Per Butir Soal | 100,000 | |
| | 12.2 | Honorarium Telaah Butir soal Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota | | | | |
| | | a. | Telaah Materi Soal | Per Butir Soal | 45,000 | |
| | | b. | Telaah Bahasa Soal | Per Butir Soal | 20,000 | |
| 13 | HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) | | | | | |
| | 13.1 | Honorarium Penceramah | | Orang/Jam/ Pelajaran | 1.000.000 | |
| | 13.2 | Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | | Orang/Jam/ Pelajaran | 300,000 | |
| | 13.3 | Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara | | Orang/Jam/ Pelajaran | 200,000 | |
| | 13.4 | Honorarium Penyusunan Modul Diklat | | Per Modul | 5.000.000 | |
| | 13.5 | Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat | | | | |
| | | a. | Lama Diklat sampai dengan 5 hari: | | | |
| | | | 1 Penanggung Jawab | Orang/Kegiatan | 450,000 | |
| | | | 2 Ketua/Wakil Ketua | Orang/Kegiatan | 400,000 | |
| | | | 3 Sekretaris | Orang/Kegiatan | 300,000 | |
| | | | 4 Anggota | Orang/Kegiatan | 300,000 | |
| | | b. | Lama Diklat 6 sampai dengan 30 hari: | | | |
| | | | 1 Penanggung Jawab | Orang/Kegiatan | 675,000 | |
| | | | 2 Ketua/Wakil Ketua | Orang/Kegiatan | 600,000 | |
| | | | 3 Sekretaris | Orang/Kegiatan | 450,000 | |
| | | | 4 Anggota | Orang/Kegiatan | 450,000 | |
| | | c. | Lama Diklat lebih dari 30 hari: | | | |
| | | | 1 Penanggung Jawab | Orang/Kegiatan | 900,000 | |
| | | | 2 Ketua/Wakil Ketua | Orang/Kegiatan | 800,000 | |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|-------------------|------------|----------------|------------|
| | | | 3 | Sekretaris | Orang/Kegiatan | 600,000 |
| | | | 4 | Anggota | Orang/Kegiatan | 600,000 |
| 14 | HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | |
| | 14.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
| | | a. | Pembina | | Orang/Bulan | 3.500.000 |
| | | b. | Pengarah | | Orang/Bulan | 3.000.000 |
| | | c. | Ketua | | Orang/Bulan | 2.500.000 |
| | | d. | Wakil Ketua | | Orang/Bulan | 2.000.000 |
| | | e. | Sekretaris | | Orang/Bulan | 1.500.000 |
| | | f. | Anggota | | Orang/Bulan | 1.300.000 |
| | 14.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
| | | a. | Ketua | | Orang/Bulan | 1.000.000 |
| | | b. | Sekretaris | | Orang/Bulan | 900,000 |
| | | c. | Anggota | | Orang/Bulan | 600,000 |
| 15 | HONORARIUM FORKOPIMDA | | | | | |
| | 15.1 | HONORARIUM FORKOPIMDA Ketua | | | Orang/Bulan | 12.500.000 |
| | 15.2 | HONORARIUM FORKOPIMDA sekretaris | | | Orang/Bulan | 11.000.000 |
| | 15.3 | HONORARIUM FORKOPIMDA Anggota | | | Orang/Bulan | 10.000.000 |
| | 15.4 | HONORARIUM FORKOPIMDA Tim Sekretariat | | | Orang/Bulan | 7.500.000 |
| 16 | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR ASN | | | | | |
| | 16.1 | UANG LEMBUR PNS | | | | |
| | | a. | Golongan I | | Orang/Jam | 18,000 |
| | | b. | Golongan II | | Orang/Jam | 24,000 |
| | | c. | Golongan III | | Orang/Jam | 30,000 |
| | | d. | Golongan IV | | Orang/Jam | 36,000 |
| | 16.2 | Uang Makan Lembur | | | | |
| | | a. | Golongan I dan II | | Orang/Hari | 35,000 |
| | | b. | Golongan III | | Orang/Hari | 37,000 |

| | | | | | |
|----|--|---|-------------------|----------------|---------------|
| | | c. | Golongan IV | Orang/Hari | 41,000 |
| 17 | SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI | | | | |
| | 17,1 | Pegawai Non Aparatur Sipil Negara | | | |
| | | a. | Uang Lembur | Orang/Jam | 20,000 |
| | | b. | Uang Makan Lembur | Orang/Hari | 31,000 |
| | 17,2 | Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti | | | |
| | | a. | Uang Lembur | Orang/Jam | 13,000 |
| | | b. | Uang Makan Lembur | Orang/Hari | 30,000 |
| | Maksimal Jam Lembur : | | | | |
| | | - Pada Hari Kerja Maksimal 5 Jam | | | |
| | | - Pada Hari Libur Maksimal 10 Jam | | | |
| 18 | HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL | | | | |
| | 18,1 | Honorarium Narasumber | | Orang/Jam | 1.700.000 |
| | 18,2 | Honorarium Moderator | | Orang/Kegiatan | 1.000.000 |
| | 18,3 | Honorarium Pembawa Acara | | Orang/Kegiatan | 750,000 |
| 19 | HONORARIUM TIM EVALUATOR | | | | |
| | 19,1 | Pembina | | Orang/Kegiatan | 10,000,000.00 |
| | 19,2 | Pengarah | | Orang/Kegiatan | 9,000,000.00 |
| | 19,3 | Penanggungjawab | | Orang/Kegiatan | 8,000,000.00 |
| | 19,4 | Ketua | | Orang/Kegiatan | 7,000,000.00 |
| | 19,5 | Sekretaris | | Orang/Kegiatan | 6,000,000.00 |
| | 19,6 | Anggota | | Orang/Kegiatan | 5,000,000.00 |
| 20 | HONORAIUM SEKRETARIAT EVALUATOR | | | | |
| | 20,1 | Koordinator | | Orang/Kegiatan | 4.000.000 |
| | 20,2 | Anggota | | Orang/Kegiatan | 3.000.000 |
| 21 | HONORARIUM TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM/TIM TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH | | | | |
| | 21.1 | Pengarah | | Orang/Kegiatan | 10.000.000 |

| | | | | |
|----|--|------------|----------------|------------|
| | 21.2 | Ketua | Orang/Kegiatan | 7.000.000 |
| | 21.3 | Sekretaris | Orang/Kegiatan | 5.000.000 |
| | 21.4 | Anggota | Orang/Kegiatan | 4.000.000 |
| 22 | Honorarium Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah di Direktorat PHD Kementerian Dalam Negeri | | | |
| | 22.1 | Pengarah | Orang/Kegiatan | 10.000.000 |
| | 22.2 | Ketua | Orang/Kegiatan | 7.000.000 |
| | 22.3 | Sekretaris | Orang/Kegiatan | 5.000.000 |
| | 22.4 | Anggota | Orang/Kegiatan | 4.000.000 |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM

| NO. | URAIAN BELANJA | SPEKIFIKASI | SATUAN | HARGA |
|-----|---|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT | | | |
| | SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I | HALFDAY | Orang/Paket | 482.000 |
| | | FULLDAY | Orang/Paket | 768.000 |
| | | FULLBOARD | Orang/Paket | 2.063.000 |
| | | RESIDENCE | Orang/Paket | 1.250.000 |
| | SETINGKAT ESELON II | HALFDAY | Orang/Paket | 442.000 |
| | | FULLDAY | Orang/Paket | 698.000 |
| | | FULLBOARD | Orang/Paket | 1.863.000 |
| | | RESIDENCE | Orang/Paket | 1.140.000 |
| | ESELON III KE BAWAH | HALFDAY | Orang/Paket | 321.000 |
| | | FULLDAY | Orang/Paket | 478.000 |
| | | FULLBOARD | Orang/Paket | 1.182.000 |
| | keterangan : | | | |
| | Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu: | | | |
| | a. Paket <i>Fullboard</i> | | | |
| | Satuan biaya paket <i>fullboard</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. | | | |
| | b. Paket <i>Fullday</i> | | | |

| | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|
| | Satuan biaya paket <i>fullday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. | | |
| c. | Paket <i>Halfday</i> | | |
| | Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. | | |
| d. | Paket <i>Residence</i> | | |
| | Satuan biaya paket <i>residence</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. | | |
| | Akomodasi Paket <i>Fullboard</i> di atur sebagai berikut | | |
| | 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang | | |
| | 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang | | |
| | | | |
| 2 | UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU | | |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor | <i>FULLBOARD</i> | Orang/Hari 200.000 |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor | <i>FULLDAY/HALFDAY</i> DI DALAM KOTA | Orang/Hari 140.000 |
| | Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar Kantor | <i>RESIDENCE</i> DI DALAM KOTA | Orang/Hari 200.000 |
| | Keterangan : Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari | | |
| | | | |
| 3. | SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN | | |
| 3.1 | MAKANAN RAPAT/KEGIATAN | | |
| | RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ | Makan | Orang/Kali 110.000 |

| | | | | |
|-----|--|--|------------|------------|
| | ESELON I/SETARA | | | |
| | | Kudapan (<i>Snack</i>) | Orang/Kali | 49.000 |
| | RAPAT BIASA | Makan | Orang/Kali | 61.000 |
| | | Kudapan (<i>Snack</i>) | Orang/Kali | 33.000 |
| | Prasmanan | Biasa | Porsi | 200.000 |
| | | VVIP | Porsi | 330.000 |
| | Makanan khas Papua | Papeda/Ubi-ubian/sejenisnya lainnya (ikan mujair+kangkung bunga +papeda) | Porsi | 200.000 |
| | Tumpeng | Kecil Komplit | Paket | 1.300.000 |
| | | Sedang Komplit | Paket | 2.210.000 |
| | | Besar Komplit | Paket | 3.250.000 |
| 3,2 | Penambah Daya Tahan Tubuh | | OH | 25.000 |
| 3.2 | MAKANAN AKTIVITAS LAPANGAN | | | |
| | Acara Bakar Batu | (1 Ekor Babi + Kelengkapannya) | Paket | 35.000.000 |
| | Keterangan: Kegiatan acara bakar batu terdiri dari : | | | |
| | babi | 1 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | sayur | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | umbi | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | tenaga lapangan | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | kayu | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | batu | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | truk | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | tenda | 1 | 500.000 | 500.000 |
| | jasa kebersihan | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | komsumsi | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | 35.000.000 |
| 4. | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN | | | |

| | | | | |
|------|--|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4.1. | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN | | | |
| | Gedung Bertingkat | | M ² /Tahun | 487.000 |
| | Gedung Tidak Bertingkat | | M ² /Tahun | 277.000 |
| | Halaman Gedung/Bangunan Kantor | | M ² /Tahun | 14.000 |
| 4.2 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS | | | |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Ketua DPRPT | | Unit/Tahun | 45.670.000 |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Anggota DPRPT | | Unit/Tahun | 44.010.000 |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I | | Unit/Tahun | 42.350.000 |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II | | Unit/Tahun | 42.530.000 |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat | | Unit/Tahun | 37.600.000 |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional <i>Double</i> | | Unit/Tahun | 39.660.000 |
| | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua | | Unit/Tahun | 5.320.000 |
| 4.3 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL | | | |
| | Operasional Dalam Lingkungan Kantor | | Unit/Tahun | 9.750.000 |
| | Roda 6 | | Unit/Tahun | 37.110.000 |
| | <i>Speedboat</i> | | Unit/Tahun | 20.240.000 |
| 4.4 | SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR | | | |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Inventaris Kantor) | Meja/Kursi | Orang/Tahun | 80.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Personal Komputer/ <i>Notebook</i>) | Personal Komputer/ <i>Notebook</i> | Unit/Tahun | 730.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Printer) | Printer | Unit/Tahun | 690.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (AC Split) | AC <i>Split</i> | Unit/Tahun | 610.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset lebih kecil dari 50 KVA | Unit/Tahun | 7.190.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 75 KVA | Unit/Tahun | 8.640.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 100 KVA | Unit/Tahun | 10.150.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 125 KVA | Unit/Tahun | 10.780.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 150 KVA | Unit/Tahun | 13.260.000 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|------------|------------|
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 175 KVA | Unit/Tahun | 14.810.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 200 KVA | Unit/Tahun | 15.850.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 250 KVA | Unit/Tahun | 16.790.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 275 KVA | Unit/Tahun | 17.760.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 300 KVA | Unit/Tahun | 20.960.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 350 KVA | Unit/Tahun | 22.960.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 450 KVA | Unit/Tahun | 25.620.000 |
| | Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset) | Genset 500 KVA | Unit/Tahun | 31.770.000 |
| | Keterangan : Biaya Pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak | | | |
| 5. | BELANJA SEWA KENDARAAN | | | |
| 5.1.1 | Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil | RODA 4 | Per Hari | 1114000 |
| | | RODA 6/BUS SEDANG | Per Hari | 4082000 |
| | | RODA 6/BUS BESAR | Per Hari | 5248000 |
| 5.1.2 | Sewa Kendaraan Operasional Pejabat | PEJABAT ESELON I | Per Bulan | 17660000 |
| | SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT | PEJABAT ESELON II | Per Bulan | 14.850.000 |
| 5.1.3 | Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan | PICK UP | Per Bulan | 8.630.000 |
| | | MINIBUS | Per Bulan | 7.200.000 |
| | | DOUBLE GARDAN | Per Bulan | 17.630.000 |
| 5,2 | SEWA SARANA MOBILITAS UDARA | | | |
| | Charter Pesawat | Nabire - Paniai | Kali | 34.100.000 |
| | Charter Pesawat | Nabire - Dogiyai | Kali | 34.100.000 |
| | Charter Pesawat | Nabire - Deiyai | Kali | 34.100.000 |
| | Charter Pesawat | Nabire - Sugapa | Kali | 38.500.000 |
| | Charter Pesawat | Nabire - Mulia | Kali | 48.400.000 |
| | Charter Pesawat | Nabire - Ilaga | Kali | 48.400.000 |

| | | | | |
|-----|--|----------------------------------|------|------------|
| | Charter Pesawat | Nabire - Timika | Kali | 57.200.000 |
| 5,3 | SEWA SARANA MOBILITAS AIR | | | |
| | SpeedBoat | Teluk Umar | Unit | 20.000.000 |
| | SpeedBoat | Wapoga | Unit | 20.000.000 |
| | SpeedBoat | Napan | Unit | 15.000.000 |
| | SpeedBoat | Yaur | Unit | 15.000.000 |
| | Keterangan : Biaya Sewa Maksimal per Unit Berdasarkan Jarak Tempuh | | | |
| 5,4 | SEWA TENDA | | | |
| | Sewa Tenda | 4x6 Meter | Hari | 630.000 |
| | Sewa Tenda | 4x6 Meter Rumbai | Hari | 695.000 |
| | Sewa Tenda | 6x6 Meter | Hari | 1.650.000 |
| | Sewa Tenda | 4x6 Meter (VIP) | Hari | 1.100.000 |
| | Sewa Tenda | 6x6 Meter (VIP) | Hari | 2.150.000 |
| | Sewa Tenda | 8x6 Meter (VIP) | Hari | 3.300.000 |
| | Sewa Tenda | 6x12 Meter (VIP) | Hari | 5.700.000 |
| | Sewa Tenda | 8x12 Meter (VIP) | Hari | 6.950.000 |
| | Sewa Tenda Panggung | Ukuran 2 x 3 Meter / Kecil (VIP) | Hari | 2.520.000 |
| | Sewa Tenda Panggung | Ukuran 4X4 /Kecil (VIP) | Hari | 1.890.000 |
| | Sewa Tenda Panggung | Ukuran 4X6 /Sedang (VIP) | Hari | 2.562.000 |
| | Sewa Tenda Panggung | Ukuran 5X8 /Sedang (VIP) | Hari | 5.040.000 |
| | Sewa Tenda Panggung | Ukuran 8X6 /Sedang (VIP) | Hari | 6.930.000 |
| | Sewa Tenda Panggung | Ukuran 8x8 /Besar (VIP) | Hari | 25.200.000 |
| | Panggung Rigging | Ukuran 6x 8 | Hari | 10.500.000 |
| | Panggung Rigging | Ukuran 10 x 12 | Hari | 15.800.000 |
| | Panggung + Tenda terowongan | Ukuran 8 x 6 | Hari | 7.300.000 |
| 5,5 | SEWA KURSI | | | |
| | Sewa Kursi | Plastik | Hari | 6.500 |
| | Sewa Kursi | Futura/Chitose | Hari | 35.000 |
| | Sewa Kursi | Futura/Chitose + Sarung Kursi | Hari | 45.000 |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|-----------|------------|
| | Sewa Kursi | <i>Futura/Chitose</i> (Jarak Jauh) | Hari | 50.000 |
| | Sewa Kursi | <i>Futura/Chitose</i> + Sarung Kursi (Jarak Jauh) | Hari | 70.000 |
| | Sewa Kursi | Plastik (Jarak Jauh) | Hari | 10.000 |
| | Sewa Kursi Sofa | Set | Hari | 2.000.000 |
| 5,6 | SEWA MEJA | | | |
| | Sewa Meja Prasmanan | Menggunakan Taplak Ukuran 60cmx1.8mtr | Hari | 525.000 |
| | Sewa Meja Prasmanan | Menggunakan Taplak Ukuran 80cmx2mtr | Hari | 720.000 |
| | Sewa Meja Bulat | Menggunakan Taplak | Hari | 850.000 |
| 5,7 | SEWA SOUND SYSTEM | | | |
| | Sewa <i>Sound System</i> 500 Watt | Di dalam Gedung / Standar | Hari | 6.500.000 |
| | Sewa <i>Sound System</i> 10000 Watt | Di luar Gedung / Standar | Hari | 13.000.000 |
| | Sewa <i>Sound System</i> 20000 Watt | Di luar Gedung | Hari | 26.000.000 |
| | Sewa Musik Gambus/Seruling Tambur | | Set/acara | 8.100.000 |
| | Sewa <i>Mic Wireless</i> | | Per hari | 650.000 |
| | Sewa <i>Keyboard</i> | | Kali | 980.000 |
| | <i>Infokus</i> 5000 Lumen | | Hari | 1.950.000 |
| | Genset 25 KVA | | Hari | 3.950.000 |
| | Genset 70 KVA | | Hari | 6.550.000 |
| 5.7.b | SEWA PERALATAN ACARA | | | |
| | Kipas Angin Uap Air | | Hari | 500.000 |
| 5.8 | SEWA GEDUNG PERTEMUAN | | | |
| | Sewa Ruang Pertemuan Hotel | 100 Orang | Hari | 37.800.000 |
| | Sewa Ruang Pertemuan Hotel | 100 Orang (8 Jam) | Kali | 6.300.000 |
| | Sewa Gedung Pertemuan | Kapasitas 150 Orang (8 Jam) | Kali | 7.560.000 |
| | Sewa Gedung Pertemuan | Kapasitas 200 Orang (8 Jam) | Kali | 7.560.000 |
| | Sewa Gedung Pertemuan | Kapasitas 300 Orang (8 Jam) | Kali | 7.560.000 |

| | | | | |
|-------|--|--|-------|-------------|
| | Sewa Gedung Pertemuan | Kapasitas 500 Orang | Hari | 6.300.000 |
| | Sewa Ruang Pertemuan Hotel | Ballroom 240 M2 (8 Jam) | Kali | 29.610.000 |
| | Sewa Ruang Pertemuan Hotel | Ballroom 240 M2 (4 Jam) | Kali | 15.120.000 |
| | Sewa Ruang Pertemuan Hotel | Ballroom 500 M2 | Hari | 56.700.000 |
| | Sewa Kamar Hotel | Deluxe | Hari | 1.108.800 |
| 5.8 b | SEWA RUMAH | | | |
| | Sewa Rumah | Kecil (150m2 - 350m2) + perabot | Tahun | 101.250.000 |
| | Sewa Rumah | Sedang (350m2 - 500m2) + perabot | Tahun | 135.000.000 |
| | Sewa Rumah | Besar >500m2 + perabot | Tahun | 202.500.000 |
| | Catatan: Sewa Rumah/Tempat Tinggal hanya diperuntukkan bagi Pejabat Eselon I, II, Pejabat Instansi Vertikal dan atau Pihak Ketiga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama | | | |
| 5.8.c | SEWA GEDUNG KANTOR | | | |
| | Sewa Gedung Kantor | Ukuran Besar Bertingkat (Akses Jalan Utama) | Tahun | 337.500.000 |
| | Sewa Gedung Kantor | Ukuran Besar Bertingkat (Akses di Luar Jalan Utama) | Tahun | 270.000.000 |
| | Sewa Gedung Kantor | Ukuran Besar Tidak Bertingkat (Akses Jalan Utama) | Tahun | 202.500.000 |
| | Sewa Gedung Kantor | Ukuran Besar Tidak Bertingkat (Akses di Luar Jalan Utama) | Tahun | 135.000.000 |
| | Sewa Gedung Kantor | Ukuran Sedang Bertingkat (Akses Jalan Utama) | Tahun | 270.000.000 |
| | Sewa Gedung Kantor | Ukuran Sedang Bertingkat (Akses di Luar Jalan Utama) | Tahun | 202.500.000 |
| | Sewa Gedung Kantor | Ukuran Sedang Tidak Bertingkat (Akses Jalan Utama) | Tahun | 135.000.000 |
| | Sewa Gedung Kantor | Ukuran Sedang Tidak Bertingkat (Akses di Luar Jalan Utama) | Tahun | 101.250.000 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 5,9 | SEWA STAN PAMERAN | | | |
| | Sewa Stan Pameran | Tingkat Nasional | Per hari | 5.000.000 |
| | Sewa Stan Pameran | Tingkat Provinsi | Per hari | 3.500.000 |
| | Sewa Stan Pameran | Tingkat Kabupaten/Kota | Per hari | 2.000.000 |
| 6. | BELANJA PUBLIKASI DAN PENYIARAN | | | |
| 6.1 | PENYIARAN (TVRI) | | | |
| | Iklan Komersial (TVC) | | | |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 5 Detik | Tayang/Spot | 98.600 |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 10 Detik | Tayang/Spot | 127.600 |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 15 Detik | Tayang/Spot | 191.400 |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 20 Detik | Tayang/Spot | 255.200 |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 30 Detik | Tayang/Spot | 319.000 |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 45 Detik | Tayang/Spot | 406.000 |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 60 Detik | Tayang/Spot | 638.000 |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 90 Detik | Tayang/Spot | 870.000 |
| | TVC/Iklan Komersial | Durasi Per 120 Detik | Tayang/Spot | 1.102.000 |
| | <i>Running Text</i> | Durasi Per 15 Detik | Tayang/Spot | 81.200 |
| | <i>Super Imposed Logo</i> | Durasi Per 15 Detik | Tayang/Spot | 81.200 |
| | <i>Time Signal 15 Detik</i> | Durasi Per 15 Detik | Tayang/Spot | 174.000 |
| | <i>Time Signal 30 Detik</i> | Durasi Per 30 Detik | Tayang/Spot | 290.000 |
| | | | | |
| | Iklan Layanan Masyarakat (PSA) | | | |
| | PSA | Durasi Per 5 Detik | Tayang/Spot | 81.200 |
| | PSA | Durasi Per 10 Detik | Tayang/Spot | 104.400 |
| | PSA | Durasi Per 15 Detik | Tayang/Spot | 203.000 |
| | PSA | Durasi Per 20 Detik | Tayang/Spot | 208.800 |
| | PSA | Durasi Per 30 Detik | Tayang/Spot | 261.000 |
| | PSA | Durasi Per 45 Detik | Tayang/Spot | 319.000 |

| | | | |
|--|----------------------|-------------|------------|
| PSA | Durasi Per 60 Detik | Tayang/Spot | 377.000 |
| PSA | Durasi Per 90 Detik | Tayang/Spot | 435.000 |
| PSA | Durasi Per 120 Detik | Tayang/Spot | 522.000 |
| <i>Running Text</i> | Durasi Per 15 Detik | Tayang/Spot | 52.200 |
| <i>Super Imposed Logo</i> | Durasi Per 10 Detik | Tayang/Spot | 81.200 |
| <i>Video Clip Musik</i> | Durasi Per 4 Menit | Tayang/Spot | 261.000 |
| | | | |
| <i>Advetorial Berita/ News</i> | | | |
| <i>Advetorial Berita</i> | Durasi Per 2 Menit | Tayang/Spot | 500.000 |
| <i>Advetorial Berita</i> | Durasi Per 5 Menit | Tayang/Spot | 1.125.000 |
| <i>Filter/ Infotorial</i> | Durasi Per 1 Menit | Tayang/Spot | 200.000 |
| <i>Filter/ Infotorial</i> | Durasi Per 2 Menit | Tayang/Spot | 400.000 |
| | | | |
| <i>Dialog/ Talk Show</i> | | | |
| Program 60 Menit | 60 Menit | Paket | 10.000.000 |
| | | | |
| Pelayanan Siaran Program | | | |
| Program 15 Menit | Durasi Per 15 Menit | Paket | 3.750.000 |
| Program 30 Menit | Durasi Per 30 Menit | Paket | 5.375.000 |
| Program 45 Menit | Durasi Per 45 Menit | Paket | 6.000.000 |
| Program 60 Menit | Durasi Per 60 Menit | Paket | 7.000.000 |
| Program 90 Menit | Durasi Per 90 Menit | Paket | 8.000.000 |
| Program 120 Menit | Durasi Per 120 Menit | Paket | 10.000.000 |
| | | | |
| Siaran Langsung (<i>Live & Live Delay</i>) | | | |
| Siaran Langsung (Lokasi Kota Nabire) | Durasi 60 Menit | Tayang/Spot | 35.000.000 |
| Siaran Langsung (Lokasi Kota Nabire) | Durasi 120 Menit | Tayang/Spot | 45.500.000 |
| Siaran Langsung Lokasi Kabupaten Nabire/di luar Kabupaten Nabire | Durasi 60 Menit | Tayang/Spot | 35.000.000 |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|-------------|-------------|
| | Siaran Langsung Lokasi Kabupaten Nabire/di luar Kabupaten Nabire | Durasi 120 Menit | Tayang/Spot | 45.500.000 |
| | <i>Live Delay</i> Lokasi Kota Nabire dan Luar Kabupaten Nabire | Durasi 60 Menit | Tayang/Spot | 35.000.000 |
| | <i>Live Delay</i> Lokasi Kota Nabire dan Luar Kabupaten Nabire | Durasi 120 Menit | Tayang/Spot | 45.500.000 |
| | Sewa Link | | Tayang/Spot | 120.000.000 |
| | | | Tayang/Spot | |
| | Siaran Tunda (<i>Live Record</i>) | | Tayang/Spot | |
| | Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/di luar Kota Nabire | Durasi 60 Menit | Tayang/Spot | 25.000.000 |
| | Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/di luar Kota Nabire | Durasi 120 Menit | Tayang/Spot | 32.500.000 |
| | Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/di luar Kota Nabire | Durasi 60 Menit | Tayang/Spot | 20.000.000 |
| | Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/di luar Kota Nabire | Durasi 120 Menit | Tayang/Spot | 26.000.000 |
| | | | | |
| 6.2 | PENYIARAN (TV SWASTA) | | | |
| | Penyiaran IKLAN MNCTV per/1 spot (<i>Primetime</i>) | Durasi : 30 Detik | Tayang/Spot | 15.120.000 |
| | Penyiaran IKLAN MNCTV per/1 spot (<i>Non Primetime</i>) | Durasi : 30 Detik | Kali | 11.340.000 |
| | Penyiaran IKLAN MNCTV per/1 spot (<i>Primetime</i>) | Durasi : 60 Detik | Kali | 30.240.000 |
| | Penyiaran IKLAN MNCTV per/1 spot (<i>Non Primetime</i>) | Durasi : 60 Detik | Kali | 22.680.000 |
| | Penyiaran NEWS PAGI MNCTV | Durasi : 2 Menit | Kali | 37.800.000 |
| | Penyiaran NEWS SIANG MNCTV | Durasi : 2 Menit | Kali | 75.600.000 |
| | Penyiaran NEWS MALAM MNCTV | Durasi : 2 Menit | Kali | 37.800.000 |
| | | | | |
| 6.3 | Cendrawasih POS | | | |
| | Belanja Surat Kabar/Majalah | | | |
| | Belanja Surat Kabar/Majalah | Cendrawasih Pos (Cepos) | Eksemplar | 15.800 |
| | Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi | | | |
| | Berita Pariwisata | | | |
| | Media Cetak | 1 halaman FC (Atas) | Per Halaman | 18.900.000 |
| | Media Cetak | 1 halaman FC (Tengah) | Per Halaman | 12.600.000 |
| | Media Cetak | 1 halaman FC (Kanan-Kiri) | Per Halaman | 10.080.000 |

| | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------|
| Media Cetak | Halaman Dalam/9 FC (Atas Foto A) | Per Halaman | 6.300.000 |
| Media Cetak | Halaman Dalam/9 FC (Atas Foto B) | Per Halaman | 3.780.000 |
| Media Cetak | Halaman Dalam/9 FC (Tengah) | Per Halaman | 3.150.000 |
| Media Cetak | Halaman Dalam/9 FC (Kanan) | Per Halaman | 2.520.000 |
| Media Cetak | Halaman Dalam BW (Atas) | Per Halaman | 1.890.000 |
| Media Cetak | Halaman Dalam BW (Tengah) | Per Halaman | 1.260.000 |
| Media Cetak | Halaman Dalam BW (Kanan) | Per Halaman | 945.000 |
| Media Cetak | Halaman Dalam BW (Kiri) | Per Halaman | 630.000 |
| Papua Society | | | |
| Media Cetak | 1 Foto | Eksemplar | 630.000 |
| Iklan Paket (BW) | | | |
| BUMN / BUMD, Perbankan, Otomotif, Properti, Penerbangan, Elektronik, Mall | 3 X 100 m (26 Hari) | Kali | 16.900.000 |
| | 2 X 100 m (26 Hari) | Kali | 11.250.000 |
| | 2 X 50 mm(26 Hari) | Kali | 5.625.000 |
| | 1 X 50 mm(26 Hari) | Kali | 2.812.000 |
| Travel, Hotel, Restoran & Pub, Pendidikan | 3 X 100 m (26 Hari) | Kali | 11.250.000 |
| | 2 X 100 m (26 Hari) | Kali | 7.500.000 |
| | 2 X 50 mm(26 Hari) | Kali | 4.125.000 |
| | 1 X 50 mm(26 Hari) | Kali | 1.875.000 |
| Pengobatan / Pijat, Salon, Kerohanian, Katering | 3 X 100 m (26 Hari) | Kali | 5.625.000 |
| | 2 X 100 m (26 Hari) | Kali | 4.125.000 |
| | 2 X 50 mm(26 Hari) | Kali | 1.875.000 |
| | 1 X 50 mm(26 Hari) | Kali | 975.000 |
| Iklan Ucapan / Sosial | 1 Halaman (26 Hari) | Kali | 16.400.000 |
| | 1/2 Halaman (26 Hari) | Kali | 8.800.000 |
| | 1/4 Halaman (26 Hari) | Kali | 4.700.000 |

| | | | | |
|-----|--|-------------------------|------|-------------|
| | | 1/8 Halaman (26 Hari) | Kali | 2.350.000 |
| | | 3 Kolom X (26 Hari) | Kali | 1.350.000 |
| 6.6 | PENYIARAN GTV | | | |
| | Penyiaran IKLAN GTV per/ 1spot (<i>Primetime</i>) | Durasi: 30 Detik | Kali | 13.860.000 |
| | Penyiaran IKLAN GTV per/ 1spot (<i>Non Primetime</i>) | Durasi: 30 Detik | Kali | 12.600.000 |
| | Penyiaran IKLAN GTV per/ 1spot (<i>Primetime</i>) | Durasi: 60 Detik | Kali | 27.720.000 |
| | Penyiaran IKLAN GTV per/ 1spot (<i>Non Primetime</i>) | Durasi: 60 Detik | Kali | 25.200.000 |
| | Penyiaran NEWS PAGI GTV | Durasi: 2 Menit | Kali | 37.800.000 |
| | Penyiaran NEWS SIANG GTV | Durasi: 2 Menit | Kali | 56.700.000 |
| | Penyiaran NEWS MALAM GTV | Durasi: 2 Menit | Kali | 37.800.000 |
| | | | | |
| 6.7 | PENYIARAN RCTI | | | |
| | Penyiaran IKLAN RCTI per/ 1spot (<i>Primetime</i>) | Durasi: 30 Detik | Kali | 16.380.000 |
| | Penyiaran IKLAN RCTI per/ 1spot (<i>Non Primetime</i>) | Durasi: 30 Detik | Kali | 13.860.000 |
| | Penyiaran IKLAN RCTI per/ 1spot (<i>Primetime</i>) | Durasi: 60 Detik | Kali | 32.760.000 |
| | Penyiaran IKLAN RCTI per/ 1spot (<i>Non Primetime</i>) | Durasi: 60 Detik | Kali | 27.720.000 |
| | Penyiaran NEWS PAGI RCTI | Durasi: 2 Menit | Kali | 50.400.000 |
| | Penyiaran NEWS SIANG RCTI | Durasi: 2 Menit | Kali | 81.900.000 |
| | Penyiaran NEWS MALAM RCTI | Durasi: 2 Menit | Kali | 50.400.000 |
| | | | | |
| 6.8 | PENYIARAN INEWS NASIONAL | | | |
| | Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/ 1spot (<i>Primetime</i>) | Durasi: 30 Detik | Kali | 10.080.000 |
| | Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/ 1spot (<i>Non Primetime</i>) | Durasi: 30 Detik | Kali | 7.560.000 |
| | Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/ 1spot (<i>Primetime</i>) | Durasi: 60 Detik | Kali | 20.160.000 |
| | Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/ 1spot (<i>Non Primetime</i>) | Durasi: 60 Detik | Kali | 15.120.000 |
| | Penyiaran NEWS PAGI INEWS NASIONAL | Durasi: 2 Menit | Kali | 37.800.000 |
| | Penyiaran NEWS SIANG/SORE INEWS NASIONAL | Durasi: 2 Menit | Kali | 56.700.000 |
| | Penyiaran NEWS MALAM INEWS NASIONAL | Durasi: 2 Menit | Kali | 50.400.000 |
| | Penyiaran TALKSHOW/DIALOG INEWS NASIONAL | Durasi: 30 Menit | Kali | 214.200.000 |

| | | | | |
|------|---|--|------|-------------|
| | Penyiaran TALKSHOW/DIALOG INEWS NASIONAL | Durasi: 60 Menit | Kali | 333.900.000 |
| | Penyiaran FULL BLOCKING INEWS NASIONAL (<i>Primetime</i>) | Durasi: 30 Menit | Kali | 226.800.000 |
| | Penyiaran FULL BLOCKING INEWS NASIONAL (<i>Non Primetime</i>) | Durasi: 30 Menit | Kali | 176.400.000 |
| | Iklan/TVC/Filter INEWS LOKAL | Durasi: 30 Detik | Kali | 693.000 |
| | Iklan/TVC/Filter INEWS LOKAL | Durasi: 60 Detik | Kali | 1.386.000 |
| | News INEWS LOKAL | Durasi: 2 Menit | Kali | 831.600 |
| | Advetorial INEWS LOKAL | Durasi: 15Menit | Kali | 6.930.000 |
| | Dialog/ Talkshow INEWS LOKAL | Durasi: 30 Menit | Kali | 13.860.000 |
| | Dialog/ Talkshow INEWS LOKAL | Durasi: 60 Menit | Kali | 27.720.000 |
| | Full Blocking INEWS LOKAL | Durasi: 30 Menit | Kali | 31.500.000 |
| | Full Blocking INEWS LOKAL | Durasi: 60 Menit | Kali | 63.000.000 |
| | | | | - |
| 6.10 | PENYIARAN JAYA TV | | | - |
| | TVC (<i>Television Comercial</i>) JAYA TV | Durasi: 30-60 Detik | Kali | 441.000 |
| | Standard Production Cost | | | 6.300.000 |
| | Prime Time Placement | | | 630.000 |
| | Public-Service Advertisement (P.S.A) - BRANDED JAYA TV | Durasi: 30-60 Detik | Kali | 315.000 |
| | Runung Text JAYA TV | 50 Kata | Kali | 63.000 |
| | Super Impose JAYA TV | Durasi: 10 Detik | Kali | 315.000 |
| | Dialog Interaktif Apa Kabar Papua JAYA TV (<i>On Air</i>) | Durasi: 60 Menit | Kali | 15.750.000 |
| | Dialog Interaktif Apa Kabar Papua JAYA TV (<i>Off Air</i>) | Durasi: 60 Menit | Kali | 9.450.000 |
| | GREETING (Ucapan Selamat) JAYA TV | Durasi: 60 Detik (Biaya Produksi + 15 Kali Tayang) | Kali | 3.150.000 |
| | Still Text Plus Voice Over JAYA TV | Durasi: 30 Detik (30 kali tayang) | Kali | 3.780.000 |
| | Ceremonial 60 Menit JAYA TV | Durasi: 60 Menit | Kali | 15.750.000 |
| | Ceremonial 30 Menit JAYA TV | Durasi: 30 Menit | Kali | 8.190.000 |
| | Ceremonial 15 Menit JAYA TV | Durasi: 15 Menit | Kali | 3.150.000 |

| | | | | |
|------|--|----------------------------|-------------|------------|
| | Ceremonial 2 Menit JAYA TV | Durasi: 2 Menit | Kali | 630.000 |
| | Siaran Langsung (Live) JAYA TV | Durasi: 60 Menit | Kali | 44.100.000 |
| | Siaran Tunda (<i>Tapping</i>) JAYA TV | Durasi: 60 Menit | Kali | 31.500.000 |
| | Dokumentasi | Durasi: 60 Menit | Kali | 12.600.000 |
| | Live Streaming Via Youtube | Durasi: 60 Menit | Kali | 10.080.000 |
| | Iklan dan Berita di Website | | | |
| | Iklan/ <i>Greeting</i> Atau Himbauan | 7 Hari | Kali | 1.260.000 |
| | Iklan/ <i>Greeting</i> Atau Himbauan | 14 Hari | Kali | 3.150.000 |
| | Kategori Berita | 1 Bulan | Kali | 3.780.000 |
| | Kategori Berita | 1 Tahun | Kali | 45.360.000 |
| | | | | |
| 6,11 | Papua Pos Nabire | | | |
| | Harga Koran | | | |
| | Koran Eceran | | Eksemplar | 5.000 |
| | Langganan Koran | | Bulan | 100.000 |
| | Iklan Ucapan | 1 Halaman | Per Halaman | 8.000.000 |
| | | 1/2 Halaman | Per Halaman | 4.000.000 |
| | | 1/4 Halaman | Per Halaman | 2.000.000 |
| | | 1/8 Halaman | Per Halaman | 1.000.000 |
| | | Kolektif (2 Kolom x 10 cm) | Per Halaman | 500.000 |
| | Iklan Pengumuman | 1 Halaman | Per Halaman | 16.000.000 |
| | | 1/2 Halaman | Per Halaman | 8.000.000 |
| | | 1/4 Halaman | Per Halaman | 4.000.000 |
| | | 1/8 Halaman | Per Halaman | 2.000.000 |
| | | Kolektif (2 Kolom x 10 cm) | Per Halaman | 1.000.000 |
| | | | | |
| 6,12 | Kesepakatan Bersama dan Kerja Sama Media Cetak dan Penyiaran | | | |

| | | | | |
|------|---|----------------------------|-------|-------------|
| | Cepos | | Tahun | 210.000.000 |
| | RRI | | Tahun | 210.000.000 |
| | Papua Pos Nabire | | Tahun | 210.000.000 |
| | | | | |
| 6,13 | Kesepakatan Bersama dan Kerja Sama Media Online | | | |
| | Nabire Net | | Tahun | 41.000.000 |
| | | | | |
| 7. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | |
| 7.1 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet | | | |
| | Indihome 2p inet+TV | 20 Mbps | Bulan | 415.000 |
| | Indihome 2p inet+TV | 30 Mbps | Bulan | 575.000 |
| | Indihome 2p inet+TV | 40 Mbps | Bulan | 675.000 |
| | Indihome 2p inet+TV | 50 Mbps | Bulan | 825.000 |
| | Indihome 2p inet+TV | 100 Mbps | Bulan | 1.325.000 |
| | Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY | 20 Mbps | Bulan | 682.500 |
| | Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY | 30 Mbps | Bulan | 945.000 |
| | Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY | 40 Mbps | Bulan | 1.245.000 |
| | Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY | 50 Mbps | Bulan | 1.470.000 |
| | Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY | 100 Mbps | Bulan | 1.807.500 |
| | Indihome 2p inet+Voice | 20 Mbps | Bulan | 335.000 |
| | Indihome 2p inet+Voice | 30 Mbps | Bulan | 495.000 |
| | Indihome 2p inet+Voice | 40 Mbps | Bulan | 595.000 |
| | Indihome 2p inet+Voice | 50 Mbps | Bulan | 750.000 |
| | Indihome 2p inet+Voice | 100 Mbps | Bulan | 1.245.000 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 2200 VA (450 VA Daya Lama) | Kali | 1.639.750 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 3500VA (450 VA Daya Lama) | Kali | 2.955.450 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 4400 VA (450 VA Daya Lama) | Kali | 3.827.550 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 5500 VA (450 VA Daya Lama) | Kali | 4.893.450 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-----------------------------|-------|------------|
| | Pemasangan Daya Listrik | 2200 VA (900 VA Daya Lama) | Kali | 1.218.100 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 3500 VA (900 VA Daya Lama) | Kali | 2.519.400 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 4400 VA (900 VA Daya Lama) | Kali | 3.391.500 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 5500 VA (900 VA Daya Lama) | Kali | 4.457.400 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 2200 VA (1300 VA Daya Lama) | Kali | 843.300 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 3500 VA (1300 VA Daya Lama) | Kali | 2.131.800 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 4400 VA (1300 VA Daya Lama) | Kali | 3.003.900 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 5500 VA (1300 VA Daya Lama) | Kali | 4.069.800 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 3500 VA (2200 VA Daya Lama) | Kali | 1.259.700 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 4400 VA (2200 VA Daya Lama) | Kali | 2.131.800 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 5500 VA (2200 VA Daya Lama) | Kali | 3.197.700 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 4400 VA (3500 VA Daya Lama) | Kali | 872.100 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 5500 VA (3500 VA Daya Lama) | Kali | 1.938.000 |
| | Pemasangan Daya Listrik | 5500 VA (4400 VA Daya Lama) | Kali | 1.065.900 |
| | Jasa Instalasi <i>Proxmox</i> VM | | Paket | 20.140.000 |
| | Instalasi <i>Indihome</i> | | Paket | 800.000 |
| | Instalasi <i>Elektrikal</i> | | Paket | 17.235.000 |
| | Biaya Langganan <i>Indihome</i> | | Bulan | 1.500.000 |
| | | | | |
| 7.2 | Belanja Air | | | |
| | Air bersih | 5000 liter | Unit | 409.500 |
| | Air bersih | 1100 liter | Unit | 138.600 |
| | Air bersih | 1200 liter | Unit | 138.600 |
| | Air bersih | 6000 liter | Unit | 441.000 |
| | | | | |
| 7.3 | Belanja Listrik | | | |
| | Belanja Listrik R-1/TR | 900 VA | kwh | 1.352 |
| | Belanja Listrik R-1/TR | 1.300 VA | kwh | 1.445 |
| | Belanja Listrik R-1/TR | 2.200 VA | kwh | 1.445 |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|-----|--------|
| | Belanja Listrik R-2/TR | 3.500 VA – 5.500 VA | kwh | 1.445 |
| | Belanja Listrik R-3/TR | > 6.600 VA | kwh | 1.445 |
| | Belanja Listrik B-2/TR | 5.501 VA – 200 kVA | kwh | 1.467 |
| | Belanja Listrik B-3/TM | > 200 kVA | kwh | 1.115 |
| | Belanja Listrik I-3/TM | > 200 kVA | kwh | 1.115 |
| | Belanja Listrik I-4/TT | > 30.000 kVA | kwh | 997 |
| | Belanja Listrik P-1/TR | 5.501 VA – 200 kVA | kwh | 1.467 |
| | Belanja Listrik P-2/TM | > 200 kVA | kwh | 1.115 |
| | Belanja Listrik P-3/TR | | kwh | 1.467 |
| | Belanja Listrik L/TR, TM, TT | | kwh | 1.645 |
| 8. | BELANJA JASA PENGIRIMAN BARANG | | | |
| I | Darat | | | |
| | Nabire - Dogiyai | Barang/Dokumen | Kg | 30.000 |
| | Nabire - Paniai | Barang/Dokumen | Kg | 30.000 |
| | Nabire - Deiyai | Barang/Dokumen | Kg | 30.000 |
| | Nabire - Nabire Wilayah Kepulauan | | Kg | |
| II | Laut | | | |
| | Jakarta - Nabire | Barang/Dokumen | Kg | 35.000 |
| | Surabaya - Nabire | Barang/Dokumen | Kg | 30.000 |
| | Makassar - Nabire | Barang/Dokumen | Kg | 21.000 |
| | Kalimantan - Nabire | Barang/Dokumen | Kg | 55.000 |
| | Nabire - Jakarta | Barang/Dokumen | Kg | 40.000 |
| | Nabire - Surabaya | Barang/Dokumen | Kg | 35.000 |
| | Nabire - Makassar | Barang/Dokumen | Kg | 40.000 |
| | Nabire - Kalimantan | Barang/Dokumen | Kg | 50.000 |
| III | Udara | | | |

| | | | | |
|-----|---|-------------------------------|------------|-----------|
| | Jakarta - Nabire | Barang/Dokumen | Kg | 125.000 |
| | Surabaya - Nabire | Barang/Dokumen | Kg | 125.000 |
| | Makassar - Nabire | Barang/Dokumen | Kg | 130.000 |
| | Kalimantan - Nabire | Barang/Dokumen | Kg | 185.000 |
| | Nabire - Jakarta | Barang/Dokumen | Kg | 115.000 |
| | Nabire - Surabaya | Barang/Dokumen | Kg | 115.000 |
| | Nabire - Makassar | Barang/Dokumen | Kg | 120.000 |
| | Nabire - Kalimantan | Barang/Dokumen | Kg | 175.000 |
| | | | | |
| 9. | Pajak Kendaraan Dinas | | | |
| | Pajak Kendaraan | Roda Dua | Tahun | 1.200.000 |
| | Pajak Kendaraan | Roda Tiga | Tahun | 2.000.000 |
| | Pajak Kendaraan | Roda Empat Avanza | Tahun | 1.500.000 |
| | | Roda Empat <i>Terios/Rush</i> | Tahun | 1.700.000 |
| | | Roda Empat <i>Innova</i> | Tahun | 2.500.000 |
| | | Roda Empat <i>Fortuner</i> | Tahun | 3.600.000 |
| | | Roda Empat <i>Landcruiser</i> | Tahun | 4.000.000 |
| | Pajak Kendaraan | Roda Enam | Tahun | 2.500.000 |
| | Pajak Kendaraan | Alat Berat | Tahun | 6.000.000 |
| | | | | |
| 10. | Jasa Petugas Upacara Hari Hari / Besar Nasional | | | |
| | - Anggota Pengamanan | | Orang | 250.000 |
| | - Dirigen | | Orang | 500.000 |
| | - Guru Pendamping Aubade | | Orang | 500.000 |
| | - Komandan Upacara | | Orang | 1.000.000 |
| | - Pasukan Pengawal TNI | | Orang | 500.000 |
| | - PATWAL | | Orang/Hari | 500.000 |
| | - Pemain <i>Keyboard</i> | | Orang | 500.000 |
| | - Pembawa Bunga Tabur | | Orang | 500.000 |

| | | | | |
|-----|--|------------------------|-------------|-----------|
| | - Pendamping Terima Tamu | | Orang | 500.000 |
| | - Peniup Trompet | | Orang | 500.000 |
| | - Perwira Upacara | | Orang | 1.000.000 |
| | - Petugas Jaga Tugu | | Orang | 500.000 |
| | - Petugas Medis | | Orang | 500.000 |
| | - Petugas Obor | | Orang | 500.000 |
| | - Petugas Pengibar Bendera | | Orang | 700.000 |
| | - Petugas PMI | | Orang | 500.000 |
| | - Petugas Terima Tamu | | Orang | 500.000 |
| | - Tim <i>Drumband</i> | | Paket | 4.000.000 |
| | - Tim Korsik | | Paket | 3.000.000 |
| | - Tim Tari | | Paket | 6.000.000 |
| | - Veteran | | Orang | 500.000 |
| | | | | |
| 11. | PEMERIKSAAN JASA LABORATORIUM | | | |
| | Uji Cemarkan Kuman/TPC | Liter untuk Air 250 ML | Sampel | 219.200 |
| | Uji Cemarkan Kuman/TPC | 50 Gr/Sampel | Sampel | 45.400 |
| | Uji Organoleptik | Bau | Sampel | 24.600 |
| | Uji Organoleptik | Rasa | Sampel | 24.200 |
| | Uji Organoleptik | Ph | Sampel | 40.800 |
| | Uji Organoleptik | Kekeruhan | Sampel | 40.800 |
| | | | | |
| 12. | Prangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya | | | |
| | MATERAI 10.000 | Lembar | Lembar | 12.000 |
| | | | | |
| 13 | Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | | | |
| | Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Perkebunan | OB | Orang/Bulan | 1.500.000 |
| | Tenaga Dokter Hewan | Orang per Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 |
| | Penjaga Pos Kesehatan Hewan | Orang per Bulan | Orang/Bulan | 750.000 |

| | | | | |
|----|--|--|----------------|------------|
| | Penjaga Pos Lalu Lintas Ternak | Orang per Bulan | Orang/Bulan | 700.000 |
| | Pengawas dan Pemeriksa Hewan Kurban | Orang | Orang | 500.000 |
| | Jasa <i>Inseminator</i> | Ekor | Ekor | 40.000 |
| | Jasa <i>Inseminator</i> | Ekor | Ekor | 60.000 |
| | Jasa ATR | Ekor | Ekor | 50.000 |
| | Biaya Operasional Penyuluh | | Orang/Bulan | 500.000 |
| | | | | |
| 14 | Jasa Pengelola Kebersihan taman | | | |
| | ketua pengelola taman | Orang/bulan | Orang/Bulan | 2.362.500 |
| | sekretaris pengelola taman | Orang/bulan | Orang/Bulan | 1.771.900 |
| | bendahara pengelola taman | Orang/bulan | Orang/Bulan | 1.771.900 |
| | tenaga kebersihan tanam <i>pholeo Park</i> | Orang/bulan | Orang/Bulan | 1.486.100 |
| | tenaga kebersihan tanam <i>pholeo Park</i> | Orang/bulan | Orang/Bulan | 1.539.200 |
| | Seragam lapangan | | | 350.000 |
| | | | | |
| 15 | BIAYA KONTRIBUSI PESERTA PELATIHAN | | | |
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 1 Bulan | Orang/Kegiatan | 25.000.000 |
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 3 Minggu | Orang/Kegiatan | 20.000.000 |
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 2 Minggu | Orang/Kegiatan | 15.000.000 |
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 1 Minggu | Orang/Kegiatan | 8.000.000 |
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 6 Hari | Orang/Kegiatan | 7.000.000 |
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 5 Hari | Orang/Kegiatan | 6.000.000 |

| | | | | |
|------|--|--|----------------|------------|
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 4 Hari | Orang/Kegiatan | 5.000.000 |
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 3 Hari | Orang/Kegiatan | 4.000.000 |
| | Kontribusi Pelatihan | Waktu Pelaksanaan Sampai Dengan 2 Hari | Orang/Kegiatan | 3.000.000 |
| 16 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) | | | |
| 16a | | | | |
| 16a1 | Biaya Diklat Kepemimpinan Provinsi dan Kabupaten | | | |
| | - Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKM) | | Orang | 51.680.000 |
| | - Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator | | Orang | 40.000.000 |
| | - Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) - | | Orang | 37.000.000 |
| | - Biaya Kepamongprajaan bagi Kepala Distrik - | | Orang | 11.450.000 |
| | - Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator | | Orang | 50.000.000 |
| | - Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) - | | Orang | 45.000.000 |
| 16a2 | Honorarium Pengajar | | | |
| | Pengaruh : | | | |
| | - Pembekalan Awal | | Orang/Jam/ | 300.000 |
| | - Penjelasan Program | | Orang/Jam/ | 300.000 |
| | - Pembekalan Akhir | | Orang/Jam/ | 300.000 |
| | Penanggung Jawab Program | | Kegiatan | 5.000.000 |
| | Narasumber/Penceramah/Pakar | | Orang/Jam/ | 1.000.000 |
| | <i>Benchmarking :</i> | | | |
| | - Panitia LOKUS | | Kegiatan | 5.000.000 |
| | Seminar Presentasi Proyek Perubahan/ <i>Laboratorium</i> | | | |
| | - Penguji | | Orang/Jam/ | 300.000 |

| | | | | |
|------|---|--|------------|-----------|
| | - Mentor | | Orang | 1.000.000 |
| | - Coach | | Orang/Jam/ | 300.000 |
| | <i>Breaktrough :</i> | | | |
| | - <i>Breaktrough - Coaching</i> | | Orang | 1.500.000 |
| | - <i>Breaktrough - Counseling</i> | | Orang | 1.500.000 |
| | Evaluasi Kepemimpinan | | Orang | 1.500.000 |
| | Evaluator Pembelajaran | | Kegiatan | 5.000.000 |
| | Evaluasi Penyelenggaraan | | Kegiatan | 5.000.000 |
| | Penunjang Program | | Kegiatan | 5.000.000 |
| | | | | |
| 16a3 | Mata Diklat : | | | |
| | - <i>Overview</i> Kebijakan Pelatihan | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - <i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Dinamika Kelompok | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Wawasan Kebangsaan dan Nilai Bela Negara | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Bela Negara Kepemimpinan Pancasila | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Manajemen Perubahan Sektor Publik | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Kepemimpinan Transformasional | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Jejaring Kerja | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Komunikasi Efektif | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Akuntabilitas Kinerja | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Hubungan Kelembagaan | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Organisasi Digital | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Manajemen Kinerja | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Pembekalan Studi Lapangan Kinerja Organisasi | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Standar Kinerja Pelayanan | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Manajemen Penganggaran | | Orang/Jam | 300.000 |

| | | |
|---|-----------|---------|
| - Manajemen Risiko | Orang/Jam | 300.000 |
| - Studi Lapangan Kinerja Organisasi | Orang/Jam | 300.000 |
| - Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Kinerja | Orang/Jam | 300.000 |
| - Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi | Orang/Jam | 300.000 |
| - Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi | Orang/Jam | 300.000 |
| - Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja | Orang/Jam | 300.000 |
| - Evaluasi Substansi | Orang/Jam | 300.000 |
| - Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja | Orang/Jam | 300.000 |
| - Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi | Orang/Jam | 300.000 |
| - Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi | Orang/Jam | 300.000 |
| - Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan | Orang/Jam | 300.000 |
| - Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila | Orang/Jam | 300.000 |
| - Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja | Orang/Jam | 300.000 |
| - Diagnosa Organisasi | Orang/Jam | 300.000 |
| - Berpikir Kreatif Dalam Pelayanan | Orang/Jam | 300.000 |
| - Membangun Tim Efektif | Orang/Jam | 300.000 |
| - Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan | Orang/Jam | 300.000 |
| - Teknik Komunikasi Publik | Orang/Jam | 300.000 |
| - Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik | Orang/Jam | 300.000 |
| - Penyusunan RKA Pelayanan Publik | Orang/Jam | 300.000 |
| - Pelayanan Publik Digital | Orang/Jam | 300.000 |
| - Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik | Orang/Jam | 300.000 |
| - Manajemen Mutu | Orang/Jam | 300.000 |
| - Manajemen Pengawasan | Orang/Jam | 300.000 |
| - Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan | Orang/Jam | 300.000 |
| - Studi Lapangan Pelayanan Publik | Orang/Jam | 300.000 |
| - Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan | Orang/Jam | 300.000 |
| - Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan | Orang/Jam | 300.000 |
| - Pembimbingan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja | Orang/Jam | 300.000 |

| | | | | |
|------|---|--|-----------|---------|
| | - Persiapan Seminar | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Seminar Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Analisis Isu Kontemporer | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Kesiapsiagaan Bela Negara | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Konsep Aktualisasi | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Muatan Substansif Lembaga | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Berorientasi Pelayanan | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Akuntabel | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Kompeten | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Harmonis | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Loyal | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Adaptif | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Kolaboratif | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Manajemen ASN | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - <i>Smart</i> ASN | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Evaluasi Akademik | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Penjelasan Aktualisasi | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Pembimbingan Rancangan Aktualisasi | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Evaluasi Rancangan Aktualisasi | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Pembekalan Habitulasi | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Evaluasi Aktualisasi | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - <i>Review</i> Kebijakan Penyelenggaraan Diklat | | Orang/Jam | 300.000 |
| | | | | |
| 16a4 | Honorarium Petugas Diklat | | | |

| | | | | |
|------|--|--|-------------|-----------|
| | - Dokter | | Orang/Acara | 1.000.000 |
| | - Petugas Kesehatan | | Orang/Acara | 1.000.000 |
| | - Tim MFD (Mental, Fisik dan Disiplin) | | Orang/Acara | 2.500.000 |
| | - Keamanan | | Orang/Acara | 1.000.000 |
| | - Instruktur Senam | | Orang/Jam | 300.000 |
| | - Pendamping Pengajar/Penceramah | | Orang/Jam | 200.000 |
| | - Tenaga IT Diklat | | Orang/Jam | 300.000 |
| | | | | |
| 16a5 | Transport | | | |
| | - Tim Medis | | Orang | 500.000 |
| | - Tim MFD (Mental, Fisik dan Disiplin) | | Orang | 500.000 |
| | - Pengajar Diklat Kepemimpinan | | Orang | 2.000.000 |
| | - Pengajar Diklat Prajabatan/Teknis | | Orang | 1.500.000 |
| | | | | |
| 16a6 | Konsumsi Panitia/Peserta | | | |
| | - Makan dan Minum Diklat | | Orang/Hari | 200.000 |
| | - Makan Pagi Diklat | | Orang/Hari | 85.000 |
| | - Makan Siang Diklat | | Orang/Hari | 100.000 |
| | - Makan Malam Diklat | | Orang/Hari | 100.000 |
| | | | | |
| 16a7 | Bahan Cetakan Diklat | | | |
| | - Modul Diklat | | Paket | 100.000 |
| | - Buku Panduan Diklat | | Buku | 50.000 |
| | - Foto dan Album Diklat | | Buku | 1.000.000 |
| | | | | |
| 16a8 | Uang Saku dan Lumsum Diklat Kepemimpinan | | | |
| | - Uang Saku Peserta | | Orang | 1.500.000 |
| | - Lumsum Penanggung Jawab | | Orang/Hari | 1.700.000 |
| | - Lumsum Ketua Rombongan | | Orang/Hari | 1.700.000 |

| | | | | |
|-------|---|--|-------------|------------|
| | - Lumsum Pembimbing | | Orang/Hari | 1.700.000 |
| | - Lumsum Pendamping | | Orang/Hari | 1.000.000 |
| | | | | |
| 16a9 | Sewa Tempat Kegiatan | | | |
| | - Sewa Kamar Diklat | | Per Hari | 650.000 |
| | - Sewa Kamar <i>Benchmarking</i> | | Per Hari | 750.000 |
| | - Sewa Kelas Diklat | | Per Hari | 500.000 |
| | - Sewa Ruangan <i>Benchmarking</i> | | Per Hari | 5.000.000 |
| | - Sewa Aula Diklat | | Per Hari | 2.000.000 |
| | | | | |
| 16a10 | Pakaian/Seragam Diklat | | | |
| | - <i>Trainingspack</i> Diklat | | Buah | 350.000 |
| | - Topi Bordir Diklat | | Buah | 60.000 |
| | - Kaos Bordir Diklat | | Buah | 250.000 |
| | - Jas Batik Papua Diklat | | Buah | 1.750.000 |
| | | | | |
| 16a11 | Bahan Pelatihan | | | |
| | - Tas Peserta | | Buah | 350.000 |
| | - Bahan Obat-obatan | | Kegiatan | 5.000.000 |
| | - Biaya STTP | | Orang/Acara | 100.000 |
| | - Foto Peserta | | Orang/Acara | 100.000 |
| | | | | |
| 16b | URUSAN KEPEGAWAIAN | | | |
| 16b1 | Tempat Kegiatan | | | |
| | - Sewa Gedung dan Laboratorium Komputer | | Kegiatan | 30.000.000 |
| | - Sewa Kamar Hotel | | Per Hari | 900.000 |
| | | | | |

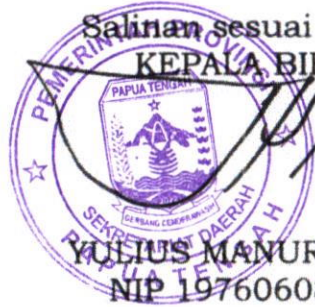
| | | | | |
|------|--|--|----------------|---------------|
| 16b2 | Jasa Narasumber | | | |
| | - Asesor Tes Psikologi | | Orang | 3.500.000 |
| | - Pewawancara Seleksi JPT | | Orang/Jam | 950.000 |
| | - Pengawas Tim BKN | | Orang/Jam | 500.000 |
| | - Asistensi Peninjauan SAPRAS CAT BKN | | Orang | 2.000.000 |
| | - Pengawas Ujian CAT Kantor Regional IX BKN | | Orang/Jam | 500.000 |
| | - Pembaca SK Pelantikan | | Orang/Kegiatan | 400.000 |
| | - Rohaniwan Pelantikan | | Orang/Kegiatan | 400.000 |
| | - MC Pelantikan | | Orang/Kegiatan | 400.000 |
| | - Pemain <i>Keyboard</i> | | Orang/Kegiatan | 400.000 |
| | - Jasa Kebersihan Kegiatan | | Kali | 500.000 |
| | - Jasa Wartawan | | Kali | 150.000 |
| 16b3 | Biaya Perjalanan Admin Seleksi CPNS | | | |
| | - Super Admin Seleksi Penerimaan CPNS BKN RI | | Orang | 25.500.000 |
| 16b4 | Barang Cetakan | | | |
| | - Buku Pengawasan CPNS, PNS dan Mutasi Pindah | | Buku | 750.000 |
| | - Buku Pengawasan Kenaikan Pangkat PNS | | Buku | 750.000 |
| | - Blangko SK Pengangkatan CPNS dan PNS | | Dus | 5.000.000 |
| | - Blangko SK Kenaikan Pangkat PNS Logo Garuda | | Dus | 5.000.000 |
| | - Buku Nominatif PNS | | Buku | 1.500.000 |
| 18 | Jasa Konsultasi | | | |
| 18a | Jasa Konsultasi Sistem Informasi Kepegawaian | | Paket | 299.981.000 |
| | Jasa Konsultasi Sistem Pengelolaan Dokumen Kepegawaian | | Paket | 175.909.800 |
| | Jasa Konsultasi Sistem Daftar Hadir Elektronik | | Paket | 199.999.800 |
| | Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah | | Tahun | 1.000.000.000 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|-------|-------------|
| 19 | Aplikasi | | | |
| 19a | Aplikasi <i>e-Office</i> | | Paket | 343.716.600 |
| | Aplikasi <i>M-File</i> | | Modul | 20.000.000 |
| 20 | <i>Medical Check Up</i> | | | |
| 20a | <i>Medical Check Up</i> | KDH dan WKDH | Tahun | 350.000.000 |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

STANDAR BIAYA UMUM PERJALANAN DINAS

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRPT dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

I.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- c. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | UANG HARIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM | DIKLAT |
|----|-------------|--------|-----------|---------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | uang harian | OH | 580.000 | 230.000 | 170.000 |

I.2 BIAYA TRANSPORTASI PEJALANAN DINAS DALAM NEGERI

I.2.1 *Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)*

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dibagi menjadi tiga(3 zona) yaitu zona I, zona II dan zona III.

- a. zona I merupakan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang mencakup perjalanan dinas dalam daerah dengan menggunakan pesawat perintis;
- b. zona II merupakan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang mencakup perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan kabupaten Mimika;
- c. zona III merupakan satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang mencakup perjalanan dinas dengan tujuan perjalanan provinsi atau kota/kabupaten yang berada dalam pulau Papua (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya);
- d. zona IV adalah satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk perjalanan dinas dengan tujuan provinsi atau kota yang berada di luar pulau Papua.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.2.1

TABEL 1.2.1
BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA TIKET |
|----|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | biaya transportasi/tiket bisnis (biaya real) (untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRPT dan pimpinan MRP-PPT) | PP | 45.000.000 |
| 2 | biaya transportasi/tiket ekonomi (biaya real) ekonomi (Zona IV) | PP | 12.000.000 |
| 3 | biaya transportasi/tiket ekonomi (biaya real) ekonomi (Zona III) | PP | 8.000.000 |
| 4 | biaya transportasi/tiket ekonomi (biaya real) ekonomi (Zona II) | PP | 5.000.000 |
| 5 | biaya transportasi/tiket ekonomi (biaya real) ekonomi (Zona I) | PP | 7.000.000 |

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya real).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Besaran Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan dan anggota DPRPT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya real).

1.1.2 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.2

TABEL 1.2.2
BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SATUAN | BESARAN |
|----|------------------------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ACEH | Orang/Kali | 127.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | Orang/Kali | 308.000 |
| 3 | RIAU | Orang/Kali | 101.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | Orang/Kali | 165.000 |
| 5 | JAMBI | Orang/Kali | 147.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | Orang/Kali | 190.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | Orang/Kali | 179.000 |
| 8 | LAMPUNG | Orang/Kali | 168.000 |
| 9 | BENGKULU | Orang/Kali | 109.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | Orang/Kali | 97.000 |
| 11 | BANTEN | Orang/Kali | 536.000 |
| 12 | JAWA BARAT | Orang/Kali | 200.000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | Orang/Kali | 256.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | Orang/Kali | 108.000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | Orang/Kali | 267.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | Orang/Kali | 233.000 |
| 17 | BALI | Orang/Kali | 227.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali | 231.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali | 116.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | Orang/Kali | 171.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | Orang/Kali | 134.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | Orang/Kali | 180.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | Orang/Kali | 533.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | Orang/Kali | 218.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | Orang/Kali | 138.000 |
| 26 | GORONTALO | Orang/Kali | 265.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | Orang/Kali | 313.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | Orang/Kali | 187.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | Orang/Kali | 165.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | Orang/Kali | 171.000 |
| 31 | MALUKU | Orang/Kali | 288.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | Orang/Kali | 215.000 |
| 33 | PAPUA | Orang/Kali | 513.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | Orang/Kali | 236.000 |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA | Orang/Kali | 236.000 |
| 36 | PAPUA TENGAH | Orang/Kali | 513.000 |
| 37 | PAPUA SELATAN | Orang/Kali | 513.000 |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | Orang/Kali | 513.000 |

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya real).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel

1.2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRPT dan MRP-PPT dipertanggungjawabkan secara lumsum.

1.1.3 Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (*One Way*)

- a. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan anggota DPRPT dan MRP-PPT dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya real)
- c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*One Way*) terinci pada Tabel 1.2.3

TABEL 1.2.3

BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

| NO. | IBU KOTA PROVINSI | TUJUAN | SATUAN | BESARAN |
|-----|-------------------|---------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NABIRE | DOGIYAI | ORANG/KALI | 2.000.000 |
| 2. | NABIRE | DEIYAI | ORANG/KALI | 2.500.000 |
| 3. | NABIRE | PANIAI | ORANG/KALI | 3.000.000 |

1.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TABEL 1.3

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

| NO | PROVINSI | SAT. | KEPALA DAERAH/PIMPINAN DPRPT DAN MRP-PPT PEJABAT ESELON I (Rp) | ANGGOTA DPRPT DAN MRP /PEJABAT ESELON II (Rp) | PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rp) | PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II, I (Rp) |
|----|------------------|------|--|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ACEH | OH | 4.774.000 | 3.526.000 | 1.578.000 | 770.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | OH | 4.960.000 | 2.195.000 | 1.188.000 | 699.000 |
| 3 | RIAU | OH | 3.820.000 | 3.119.000 | 1.650.000 | 852.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | OH | 5.772.000 | 2.318.000 | 1.297.000 | 792.000 |
| 5 | JAMBI | OH | 5.004.000 | 4.102.000 | 1.225.000 | 580.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | OH | 5.236.000 | 3.332.000 | 1.353.000 | 701.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | OH | 6.298.000 | 3.083.000 | 1.966.000 | 861.000 |
| 8 | LAMPUNG | OH | 4.491.000 | 2.488.000 | 1.539.000 | 580.000 |
| 9 | BENGGULU | OH | 2.140.000 | 1.628.000 | 1.546.000 | 692.000 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10 | BANGKA BELITUNG | OH | 4.134.000 | 2.838.000 | 1.957.000 | 676.000 |
| 11 | BANTEN | OH | 5.725.000 | 2.373.000 | 1.301.000 | 724.000 |
| 12 | JAWA BARAT | OH | 5.812.000 | 2.755.000 | 1.298.000 | 686.000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | OH | 8.720.000 | 2.063.000 | 992.000 | 730.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | OH | 5.728.000 | 1.998.000 | 1.201.000 | 810.000 |
| 15 | D.I YOGYAKARTA | OH | 5.017.000 | 2.695.000 | 1.495.000 | 845.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | OH | 4.449.000 | 2.007.000 | 1.153.000 | 814.000 |
| 17 | BALI | OH | 6.848.000 | 2.433.000 | 1.685.000 | 1.138.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | OH | 4.375.000 | 2.648.000 | 1.418.000 | 907.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | OH | 3.750.000 | 2.133.000 | 1.355.000 | 688.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | OH | 2.654.000 | 1.923.000 | 1.125.000 | 538.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | OH | 4.901.000 | 3.391.000 | 1.160.000 | 659.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | OH | 4.797.000 | 3.316.000 | 1.500.000 | 697.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | OH | 4.000.000 | 2.188.000 | 1.507.000 | 804.000 |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | OH | 4.000.000 | 2.735.000 | 1.507.000 | 904.000 |
| 25 | SULAWESI UTARA | OH | 4.919.000 | 2.290.000 | 1.270.000 | 978.000 |
| 26 | GORONTALO | OH | 4.168.000 | 3.107.000 | 1.606.000 | 955.000 |
| 27 | SULAWESI BARAT | OH | 4.076.000 | 3.098.000 | 1.344.000 | 704.000 |
| 28 | SULAWESI SELATAN | OH | 4.820.000 | 1.938.000 | 1.423.000 | 745.000 |
| 29 | SULAWESI TENGAH | OH | 2.309.000 | 2.027.000 | 1.679.000 | 951.000 |
| 30 | SULAWESI TENGGARA | OH | 3.089.000 | 2.574.000 | 1.297.000 | 786.000 |
| 31 | MALUKU | OH | 3.467.000 | 3.240.000 | 1.059.000 | 667.000 |
| 32 | MALUKU UTARA | OH | 4.612.000 | 3.843.000 | 1.160.000 | 654.000 |
| 33 | PAPUA | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 34 | PAPUA BARAT | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000 |
| 35 | PAPUA BARAT DAYA | OH | 3.872.000 | 3.341.000 | 2.056.000 | 967.000 |
| 36 | PAPUA TENGAH | OH | 3.859.000 | 3.318.000 | 2.521.000 | 1.038.000 |
| 37 | PAPUA SELATAN | OH | 5.673.000 | 4.877.000 | 3.706.000 | 1.526.000 |
| 38 | PAPUA PEGUNUNGAN | OH | 5.711.000 | 4.911.000 | 3.731.000 | 1.536.000 |

- a. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya real). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- b. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRPT dan MRP-PPT dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya real).

I.4 SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

- a. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya *tips porter*, *tips pengemudi*, yang diberikan secara *lumsum*.
- c. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri terinci pada tabel 1.4

TABEL 1.4
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO. | URAIAN | SATUAN | LUAR KOTA | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM |
|-----|--------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pejabat Negara, Pejabat Daerah | OH | 250.000 | 125.000 |
| 2 | Pejabat Eselon I | OH | 200.000 | 100.000 |
| 3 | Pejabat Eselon II | OH | 150.000 | 75.000 |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002